

PERENCANAAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN INTEGRASI KEILMUAN

Dr. Muhammad Anshar, M.Si

Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

**PERENCANAAN KAWASAN AGROPOLITAN
INTEGRASI KEILMUAN**

Penulis:

Dr. Muhammad Anshar, M.Si

Editor:

Irsyadi Siradjuddin, SP.,M.Si

Penyelaras Akhir:

M. Hidayat

Cetakan I: 2021

iii + 105 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN:

Alauddin University Press

UPT Perpustakaan UIN Alauddin

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong,

Samata, Kabupaten Gowa

Website: <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>

PENGANTAR REKTOR

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah SWT beserta salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang harus selalu *diupdate* dan *diupgrade*. Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras yang mengurus waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan *Alauddin University Press* ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan.

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup.

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 100 buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2021 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara umum.

Gowa, 17 Agustus 2021
Rektor;

Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur yang senantiasa tercurahkan kepada ALLAH SWT, atas ridha, rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat dirampungkan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan UIN Alauddin Makassar, dan Pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin atas kesempatan, dukungan, dan semangat yang diberikan selama menjalankan aktivitas sebagai civitas akademika pada UIN Alauddin Makassar termasuk di dalamnya dalam proses penulisan dan perampungan buku ini. Ungkapan terima kasih pula kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyusunan buku ini.

Kami sadar bahwa dalam buku ini masih terdapat hal – hal yang belum sempurna, sehingga masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan karya-karya kami dimasa akan datang.

Akhirnya, dengan hadirnya buku ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan bidang keilmuan dan teknologi, Aamin.

Samata Gowa, Juni 2021

Muhammad Anshar

DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR.....	iii
PENGANTAR PENULIS	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1
1. Arah Pembangunan	1
2. Pembangunan Perdesaan.....	2
3. Skala Prioritas Pembangunan.....	3
BAB II TEORI DAN KONSEP PEMBANGUNAN DAERAH	4
1. Konsep Pembangunan Daerah.....	4
2. Teori-teori terkait Pembangunan Daerah.....	9
BAB III LANDASAN HUKUM PERENCANAAN KAWASAN AGROPOLITAN	14
1. Peraturan Perundang-Undangan	14
2. Tinjauan Hukum Islam Perencanaan Kawasan Agropolitan..	25
BAB IV PENDEKATAN PENATAAN RUANG KAWASAN AGROPOLITAN	36
1. Pendekatan Penataan Ruang.....	36
2. Pendekatan Keterbukaan	36
BAB V KEDUDUKAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS AGROPOLITAN	66
1. Kawasan Budidaya Pertanian.....	66
2. Kawasan Pertanian Berbasis Agropolitan.....	72
3. Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Daerah	78
DAFTAR PUSTAKA	95
BIOGRAFI PENULIS.....	100

BAB I

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Arah Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang tentunya diarahkan menjadi lebih baik sesuai dengan arah dan tujuan negara ataupun daerah. Pemerintah sebagai organisasi yang dibentuk untuk menjalankan system pemerintahan, memiliki salah satu fungsi pembangunan. Pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan berdaulat .

Pembangunan daerah memiliki visi untuk mensejahterakan masyarakat di semua wilayah, mengurangi ketimpangan antara wilayah, dan terciptanya akselerasi optimalisasi ruang yang serasi dalam bingkai NKRI. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, pembangunan diarahkan untuk pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan system perdagangan antar daerah, pengembangan kota menengah dan kota kecil, pertumbuhan kota metropolitan, pembangunan perdesaan dengan melakukan sinergi antara kegiatan yang dilakukan di perkotaan dengan kegiatan di perdesaan, peningkatan hubungan satu daerah dengan daerah

lainnya melalui kerjasama yang saling menguntungkan, penciptakan iklim yang mendukung bagi penanam modal, peningkatan Kerjasama antar negara, pemberdayaan masyarakat, pengembangan wilayah tertinggal dan pengembangan wilayah perbatasan.

Sebagai sektor primer, pertanian secara umum perlu dioptimalkan baik di pasar lokal, nasional dan internasional dengan mendorong produksi secara massif. Pengembangan sektor ini hendaknya dilaksanakan secara sistemik, terukur, cermat dan terarah dalam menjamin terwujudnya peningkatan dan perkembangan ekonomi nasional ke arah lebih maju, modern dan kuat pada era industrialisasi dan digitalisasi.

2. Pembangunan Perdesaan

Pembangunan perdesaan merupakan suatu proses perubahan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan dan kualitas hidup masyarakat di desa untuk mencapai hidup yang lebih baik dan sejahtera. Perubahan ini dapat mencakup system kehidupan masyarakat seperti ekonomi, infrastruktur, Pendidikan dan teknologi.

Kawasan perdesaan merupakan kawasan dimana aktivitas utama masyarakatnya adalah kegiatan di sector pertanian dengan mengelola sumber daya alam pada area dalam kawasan. Selain fungsi kawasan sebagai tempat permukiman bagi warganya, didalamnya juga terdapat aktivitas ekonomi, pelayanan jasa pemerintahan, dan pelayanan kesehatan dan pelayanan social lainnya,

Proses awal pembangunan perdesaan dilakukan dengan membuat perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tentang program, kegiatan, dan kebutuhan masyarakatnya yang menjadi prioritas. Perumusan pembangunan desa dilakukan melalui penilaian terhadap jenis-jenis kebutuhan masyarakat yang terdiri atas : 1) akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa yang didasarkan pada kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang terdapat di desa tersebut; 3) pengembangan sektor pertanian berskala produktif dengan melihat komoditi unggulan desa; 4) penggunaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk pengolahan sumber daya lokal demi peningkatan perekonomian; dan 5) peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban sehingga menimbulkan rasa aman dan ketenteraman bagi masyarakat desa.

Pembangunan perdesaan tentunya perlu didukung pula oleh wilayah atau daerah disekitarnya. Sinergitas antara kegiatan perkotaan dan perdesaan dalam pembangunan perdesaan merupakan langkah kongkrit dalam perwujudan hubungan dan interaksi antar desa dan kota yang serasi, selaras dan seimbang.

3. Skala Prioritas Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari ketersediaan sumber daya termasuk didalamnya sumber pendanaannya. Adanya keterbatasan tersebut sehingga diperlukan skala prioritas pembangunan. Skala prioritas pembangunan merupakan proses memilih program dan kegiatan yang paling dibutuhkan dan mendesak untuk dilaksanakan dari berbagai program dan kegiatan yang diusulkan oleh stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan, hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dan berjalan dengan efektif sesuai tujuan perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama.

Pembangunan jangka panjang merupakan proses dari rangkaian program dan kegiatan skala prioritas yang tercantum dalam RPJM. Program dan kegiatan skala prioritas yang tertulis dalam dokumen perencanaan mencerminkan tingkat keterdesakan permasalahan yang akan diselesaikan, dengan tidak mengabaikan permasalahan lainnya yang ada. Oleh sebab itu, skala prioritas dalam setiap rencana pembangunan jangka menengah tidak sama, akan tetapi harus berkelanjutan dari periode keperiode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.

BAB II

TEORI DAN KONSEP PEMBANGUNAN DAERAH

1. Konsep Pembangunan Daerah

Terdapat beberapa konsep pembangunan yang pernah diterapkan dan masih dilanjutkan sampai dengan saat ini. Hal ini merupakan konsep dasar pembangunan yaitu: (1) Konsep pembangunan wilayah berbasis karakter sumber daya dimana pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu di daerah didasarkan pada sumber daya yang terdapat di wilayah tersebut; (2) konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang dimana menggunakan pendekatan penataan ruang. Dalam konsep ini wilayah dibagi dalam pusat pertumbuhan, integrasi fungsional dan desentralisasi; (3) konsep pengembangan wilayah terpadu dimana konsep ini menekankan pada kerjasama antar sector dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan; (4) konsep pengembangan wilayah berdasarkan kluster dimana dalam konsep ini difokuskan pada ketergantungan dan hubungan keterkaitan para pelaku di dalamnya dalam suatu jaringan kerja.

a) Perencanaan Pembangunan Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa : “ *Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.*” Jadi pada dasarnya wilayah merupakan suatu kesatuan yang utuh, bukan hanya membahas tentang suatu ruang dengan batas-batas tertentu tetapi juga terkait dengan permasalahan yang ada, sehingga ahli regional dalam membahas tentang wilayah memiliki ketertarikan di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dapat ditinjau dari berbagai bidang kehidupan.

Pengembangan wilayah dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran suatu wilayah melalui pemberdayaan semua potensi yang dimiliki secara optimal dan memperhatikan keselarasan dan keseimbangan pembangunan antar daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

b) Pembangunan Wilayah Perdesaan

Pembangunan wilayah perdesaan merupakan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi wilayah pedesaan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan, mengembangkan dan memajukan potensi desa, sedangkan pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan dan kualitas hidup di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Desa perlu membuat perencanaan dengan keterlibatan segenap komponen masyarakat di desa tersebut dengan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunannya.

Dalam proses perencanaan yang dilakukan di desa, beberapa komponen penting yang perlu dipahami oleh pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat termasuk didalamnya bagi pendamping masyarakat, yaitu: a) pemahaman terhadap kondisi lingkungan masyarakat, b) pemahaman terhadap arah dan program pembangunan desa, c) pemahaman terhadap data desa yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan analisa dalam penyusunan sebuah perencanaan, d) pemahaman terhadap metode partisipatif yang digunakan dalam penyusunan perencanaan desa, dan e) bagaimana memotivasi masyarakat dalam mengenal diri dan

lingkungannya termasuk didalamnya kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas dan kehidupan yang lebih baik di desanya.

Berdasarkan pola proses perencanaan di Indonesia, proses perencanaan di desa menjadi tugas dari Pemerintah Desa, dimana dengan semangat jiwa gotong royong pemerintah desa melibatkan masyarakatnya melalui musyawarah yang dikenal dengan nama Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. Penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepada hasil musyawarah desa dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam mendorong perencanaan pembangunan wilayah perdesaan dalam lingkup bidang pemerintahan Desa khususnya penyelenggaraan, pelaksanaan serta pembinaan masyarakat perdesaan dalam perspektif pembangunan desa disusun suatu perencanaan meliputi: (a). RPJMDes dengan masa waktu 6 (enam) tahun; b) Rencana Tahunan atau RKP DESA , sebagai penjabaran dari RPJMDes untuk masa 1 (satu) tahun. Kedua dokumen perencanaan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. (Kessa W, 2015).

c) Kawasan Agropolitan

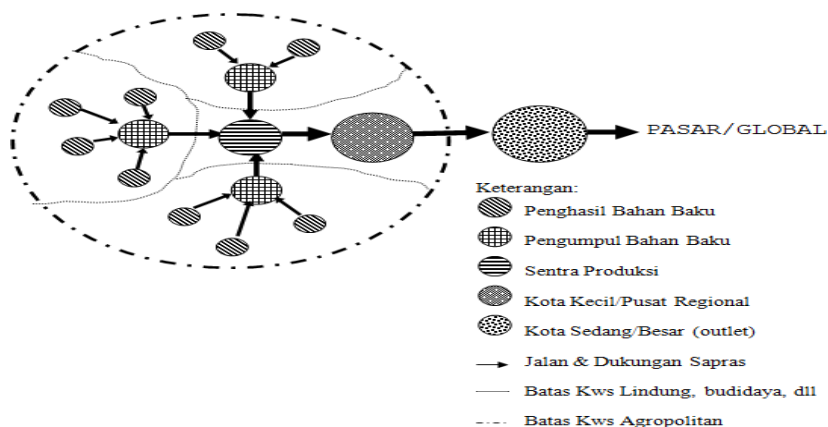
Konsep agropolitan diperkenalkan oleh Friedmann dan Douglas pertama kalinya pada tahun 1975, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan perekonomian antar wilayah di negara-negara berkembang Asia. Pengembangan agropolitan di Indonesia dimulai pada tahun 2002 melalui sebuah kesepakatan bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Kesepakatan tersebut dipertegas dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 441/Kpts/KP.150/7/2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan. Program pengembangan Kawasan agropolitan ini selanjutnya mendapat dukungan dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Bappenas.

Pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia, pertama kali dirintis di delapan kabupaten yaitu 1) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, 2) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, 3) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, 4) Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta, 5) Kabupaten Bangli Provinsi Bali, 6) Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, 7) Kabupaten Kutai

Timur Provinsi Kalimantan Timur dan 8) Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo.

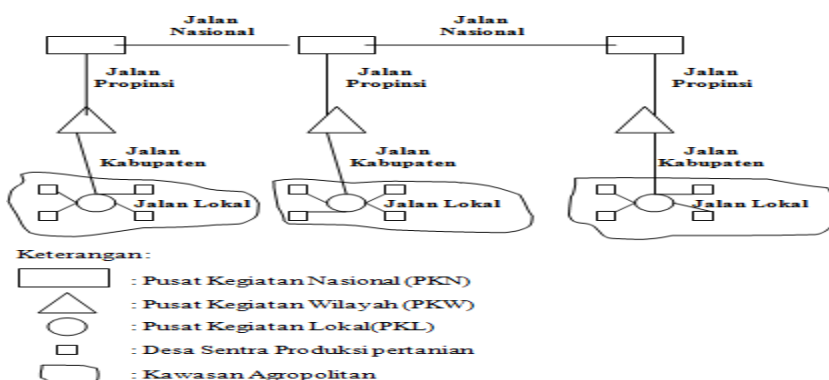
Secara konseptual agropolitan mengandung kata agro dan politan. Kata agro mengandung arti pertanian, sedangkan kata politan berarti kota. Agropolitan adalah kota pertanian yang bergerak secara massif dengan menggunakan konsep agribisnis dan kegiatan pertanian di wilayah tersebut juga memberikan dampak kepada daerah sekitarnya untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan pertanian. Disebut kota pertanian, karena sasaran dalam pengembangan agropolitan adalah pengembangan dan pembangunan infrastruktur di pedesaan yang setara kota, penguatan kelembagaan, perekonomian pedesaan tumbuh berkembang dengan bidang pertanian menjadi bidang pekerjaan utama masyarakat dan didukung pengolahan hasil dan pemasaran yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

Pembangunan kawasan dengan konsep agropolitan merupakan konsep pembangunan tata ruang wilayah yang menyatukan interaksi antara pembangunan perdesaan dan perkotaan yang saling menguntungkan. Basis Kawasan agropolitan adalah pertanian agribisnis dengan potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan secara optimal dari hulu ke hilir dengan tetap memelihara dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan konsep pendekatan pengembangan Kawasan perdesaan yang dikelola sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah desa itu sendiri, di mana terdapat penduduk yang mayoritasnya bekerja di sektor pertanian. Kawasan agropolitan memiliki komponen utama sebagai pembentuk kawasan yaitu (1) subsistem kota tani utama sebagai kawasan pusat pelayanan yang focus pada hubungan agribisnis eksternal, (2) subsistem kota tani sebagai kawasan pelayanan agribisnis dan (3) subsistem *hinterland* sebagai kawasan produksi pertanian dilakukan. Kota tani utama dan kota tani lainnya memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kota tani utama wilayahnya diperuntukkan untuk pelayanan jasa dan pemasaran, kota tani sebagai kawasan pemukiman dan kawasan agribisnis, sedangkan Wilayah *hinterland* diperuntukkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya.



Gambar 1: Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan (Djakapermana,2003).

Gambar ini menunjukkan ciri kawasan agropolitan sebagai bentuk pengembangan wilayah yang berbasis pertanian. Kawasan didominasi oleh aktivitas pertanian atau aktivitas agribisnis yang utuh mulai dari hulu (seperti penyediaan sarana produksi), kegiatan budidaya hingga hilir seperti pengolahan hasil produksi pertanian. Di tingkat yang lebih luas, pengembangan agropolitan dapat menciptakan suatu keterkaitan antara kota dan pedesaan yaitu melalui pergerakan barang, modal dan manusia. Keterkaitan tersebut dapat ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.



Gambar 2: Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Djakapermana, 2003)

Penetapan suatu wilayah menjadi kawasan agropolitan harus memiliki atau memenuhi kriteria tertentu yang dapat mendukung penerapan konsep agropolitan. Kawasan agropolitan harus memiliki kriteria:

1. Daya dukung sumber daya alam dan lingkungan yang memungkinkan (kesesuaian lahan, agroklimat dan agroteknologi) untuk dapat dikembangkan sistem dan usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan.
2. Terdapat komoditas unggulan berbasis pertanian sebagai penggerak ekonomi kawasan. (Mulyono J, 2019).
3. Perbandingan luas kawasan dengan jumlah penduduk yang ideal untuk pembangunan system dan usaha agribisnis dengan skala ekonomi yang memadai dan jenis usaha pendukung lainnya.
4. Tersedia prasarana dan sarana untuk mendukung proses produksi dasar seperti pengairan, listrik, transportasi, pasar lokal dan kios yang menyediakan sarana produksi dan kebutuhan pertanian lainnya.
5. Lahan berada pada lokasi yang strategis dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi sentra pelayanan, dan menjadi daerah interkoneksi antar daerah/kawasan sekitarnya yang terintegrasi secara fungsional.

2. Teori-teori terkait Pembangunan Daerah

a) Teori Lokasi

Prinsip teori ini adalah optimalisasi fungsi ruang untuk seluruh kegiatan ekonomi secara maksimum. Pembangunan wilayah/daerah sebagai suatu proses banyak dikembangkan dengan berdasar pada teori lokasi dimana pembangunan perlu dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara efisien dan efektif dalam melaksanakan kegiatan sosial ekonomi.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kegiatan ekonomi dengan kegiatan lain yang saling berinteraksi. Hal ini menghadirkan munculnya biaya transportasi sebagai konsekwensi dari interaksi antar lokasi aktivitas ekonomi tersebut. Teori lokasi menekankan perlunya penataan lokasi agar terhubung secara optimal untuk meminimalisasi pembengkakan biaya.

Teori lokasi menjadi dasar hadirnya landasan teori terhadap pembangunan wilayah dengan kerangka optimalisasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi. Lokasi kegiatan ekonomi terdapat jarak manakala aktivitas antar ekonomi saling berkesesuaian yang menghadirkan konsekuensi yakni munculnya biaya transportasi angkutan. Tokoh yang dikenal sebagai pelopor landasan teori lokasi adalah von Thunen, Weber dan Christaller yang berkembang sejak awal abad 19. Namun dalam proses perjalanannya, terdapat tokoh selanjutnya yang umumnya melakukan pendalaman atau modifikasi pada salah satu teori atau menggabung teori dari tiga tokoh tersebut.

Landasan berpikir teori Von Thunen adalah : (1) Kondisi petani dengan lokasi yang berada jauh dari pusat pasar/kota untuk memasarkan hasil produksinya. (2) Perbedaan terhadap tarif sewa lahan pertanian yang nilainya bergantung dari tata guna lahan. Dimana lahan akan menjadi lebih mahal apabila berada di dekat pusat pasar atau kota. Hal ini disebabkan karena factor jarak akan menimbulkan biaya yang lebih besar dalam proses pengangkutan atau transportasi.

Teori Weber dikenal dengan teori lokasi industri dimana dalam penentuan lokasi industri didasarkan kepada pengeluaran biaya minimal. Untuk mencapai minimalisasi biaya tersebut maka yang menjadi pertimbangan penentuan lokasi adalah biaya transportasi dan tenaga kerja.

Teori Christaller dengan teori model tempat sentral (*central place model theory*) menyatakan bahwa tanah yang positif adalah tanah yang memberikan dukungan kepada pusat kota. Pada pusat kota diadakan dan disediakan tanah/lingkungan disekitar untuk berbagai jasa penting. Kota merupakan pusat daerah yang produktif dan menjadi pusat didaerah itu sendiri serta menjadi pusat aktivitas bagi kota yang lebih kecil disekitarnya.

b) Teori Land Rent

Pada sektor pertanian, dibutuhkan luasan lahan yang sesuai dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Dalam mendorong pengembangan wilayah pertanian perhitungan jarak ke pasar menjadi hal yang strategis dalam menghadirkan hasil yang maksimal bagi konsumen maupun para petani.

Pusat pasar merupakan tempat pemasaran hasil aktivitas dari proses pertanian yang dilakukan dan memperoleh pengadaan input

produksi. Hamparan luasan lahan yang bervariasi terhadap pusat pasar menjadi sesuatu yang strategis dalam pengembangan kawasan pertanian. Pengembangan kawasan pertanian penting dalam memperhitungkan lokasi untuk mendapatkan efisiensi khususnya menekan biaya transport total per satuan unit produk terendah. Dengan demikian dapat mendorong perkembangan konfigurasi ruang pertanian yang optimal yang pada gilirannya pengembangan wilayah pertanian dapat memberikan hasil yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan petani.

Teori sewa lahan (*land rent*) yang dikembangkan oleh Ricardo, menjelaskan : (1) satu pusat kota menjadi sebuah keniscayaan; (2) posisi kota berada pada daerah yang datar; (3) biaya transportasi menyesuaikan dengan jarak tempuh ke segala arah, maka posisi lahan yang makin kearah kota makin tinggi tingkat aksesibilitasnya; (4) posisi tawar lahan akan jatuh pada penawaran tertinggi.

Barlow (1978) menjelaskan keterkaitan nilai *land rent* dengan alokasi sumber daya lahan. Sektor yang bernilai ekonomis tinggi potensinya akan berlokasi pada kawasan strategis (*Land rent*) dan dimaknai sebagai *locational rent*. Barlow juga menegaskan bahwa nilai rent potensi sumberdaya lahan terbagi menjadi sewa kontrak (*contract rent*), sewa lahan (*land rent*); dan nilai rent ekonomi dari lahan (*economic rent*).

Teori *Land Rent* menurut Ricardo menekankan pada *land rent* bidang pertanian dengan menghadirkan pandangan bahwa tidak ada *rent* yang diterima pada daerah yang subur, dimana lahan yang ada hanya dimanfaatkan dan diusahakan untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan penduduk (*subsistence*). *Rent* akan hadir apabila ada penambahan populasi penduduk dan ada peningkatan permintaan lahan yang mengakibatkan pemanfaatan lahan yang tidak subur. *Economic rent* atau *land rent* merupakan surplus ekonomi (*economic surplus*) atau surplus pendapatan (*income surplus*) atas biaya atau harga input tanah yang dimanfaatkan dalam proses produksi.

Dengan demikian bahwa hal yang strategis dalam penetapan kawasan pertanian adalah komitmen yang kuat dan konsisten dari seluruh *stakeholder* dalam memberikan perlindungan kawasan pertanian. Peran pemerintah diperlukan untuk memberikan perlindungan melalui regulasi perundang-undangan termasuk yang termaktub dalam dokumen Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c) Teori Pertumbuhan Neo-Klasik (Adam Smith–David Ricardo–Thomas R. Malthus)

Teori ini fokus pada mekanisme pasar yang terjadi dalam proses pengembangan wilayah. Pandangan terhadap teori ini melihat bahwa setiap wilayah mempunyai potensi yang dapat menanggulangi kesenjangan antarwilayah kepada keadaan yang mencapai keseimbangan yang dipengaruhi oleh ketersediaan modal, kemajuan teknologi dan tenaga kerja itu sendiri.

d) Teori Pertumbuhan Neo-Keynes (Harrod - Domar)

Teori ini berpandangan bahwa melalui intervensi pemerintah suatu wilayah dapat dikembangkan dengan lebih baik. Pemerintah melakukan investasi pada wilayah kurang berkembang untuk mendorong pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan dianggap memadai oleh para investor tidak selamanya sama dengan laju pertumbuhan dengan kondisi dasar. Laju pertumbuhan menjadi lebih baik didorong oleh pertumbuhan angkatan kerja, peningkatan produktivitas serta kemajuan teknologi.

e) Teori Pentahapan (Rostow, Hoover & Fisher)

Teori ini dalam pandangannya melihat bahwa wilayah berkembang melalui proses tahapan perkembangan (*stages theory*), dimana tahapan perkembangan tersebut pergerakannya diawali dari sektor primer yaitu pertanian menuju ke sector tersier pelayanan dan jasa. Namun teori ini terus mengalami perubahan paradigma.

f) Teori Unbalanced Growth /Ketimpangan Wilayah (Myrdal-Hirschman)

Teori menegaskan bahwa suatu perkembangan wilayah sulit mencapai keseimbangan dalam waktu bersamaan yang dipengaruhi oleh potensi dan investasi yang tidak merata atau optimal. Perkembangan suatu industri akan mempengaruhi hadirnya prasarana yang akan mendorong munculnya sebuah industri dan mendorong terhadap berkembangnya sebuah wilayah dengan komponen pusat pertumbuhan dan hierarkinya. (Anisah A, Soedwihajono S, Miladan N, 2017).

g) Teori Regional development (*Christaller dan Loch*)

Teori ini menegaskan bahwa regional adalah sistim hirarkis pada suatu lokasi yang didalamnya terdapat dalam beberapa kota.

Setiap region memiliki ragam orde kota. Orde tersebut dicirikan dengan berbagai barang yang ditawarkan oleh setiap kota, dan pada gilirannya menjadi pasar (regional) dengan berbagai macam barang.

h) Teori Kinerja pusat pertumbuhan (*Parr*).

Pandangan dari teori ini menegaskan bahwa hal yang mendasar mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan yakni konsentrasi prasarana kota berada pada pusat pertumbuhan sebagai upaya untuk mendukung kehidupan sosial ekonomi. Prasarana yang berskala luas akan menciptakan skala eksternalitas, sehingga kota memiliki daya tarik bagi masyarakat dan mendorong masuknya investasi. Hal ini menimbulkan investasi menjadi lebih besar, terjadi konsentrasi aktifitas perekonomian (*aglomerasi*), Industri mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan yang dipengaruhi oleh adanya aliran investasi yang langsung ke pusat pertumbuhan. Dikaitkan dengan aglomerasi ekonomi, kota diasumsikan mengimpor barang dari kota yang lebih besar atau mengekspor barang ke kota yang lebih kecil dan tidak ada interaksi antara kota lain yang besarnya sama. (Setiyanto A, Irawan B, 2014).

BAB III

LANDASAN HUKUM PERENCANAAN KAWASAN AGROPOLITAN

1. Peraturan Perundang-Undangan

a) Undang-Undang R.I Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Penataan ruang berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam kawasan, dapat dibedakan atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Undang-Undang R.I Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 48 dijelaskan bahwa :

“Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Penataan ruang Kawasan perdesaan diarahkan untuk: a) pemberdayaan masyarakat perdesaan; b) pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c) konservasi sumberdaya alam; d) pelestarian warisan budaya local; e) pertahanan Kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f) penjagaan keseimbangan pembangunan perkotaan.”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa “Penataan Ruang Kawasan Perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang

merupakan bagian wilayah kabupaten; atau kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi”.

Kawasan agropolitan menjadi sebuah pendekatan dalam kerangka pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan agropolitan menjadi embrio kawasan perdesaan berbasis aktivitas pertanian, kegiatan yang menunjang sector pertanian, dan kegiatan pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian kawasan agropolitan menjadi sebuah Kawasan yang didalamnya menjadi sentra pada wilayah perdesaan dengan beberapa kegiatan sebagai bagian dari pengolahan sumber daya alam termasuk kegiatan pertanian.

Arah pengembangan kawasan agropolitan didorong untuk menghadirkan layanan sarana dan prasarana yang efisien sebagai penunjang aktivitas pertanian yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung mulai dari proses pertanian di hulu sampai dengan pemasaran hasil industry sector pertanian di hilir dengan mempertimbangan pengaturan letak perumahan penduduk, lokasi aktivitas produksi, lokasi pusat pelayanan, dan penempatan sarana dan prasarana.

Pada pasal 51 ayat 1 dan 2 dijelaskan “Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan khususnya kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten yang memuat : a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan; b) rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan; c) rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; d) arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan e) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.”

b) Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perjuangan para pahlawan dengan hasil kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan, menjadi tugas bagi kita untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dan mencapai cita – cita bangsa dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang

dilaksanakan dapat berjalan efisien, dan efektif, memerlukan proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 dijelaskan bahwa : “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ”Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam prespektif jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah secara massif dan holistic.”

Pada pasal 2 ayat Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa: “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : a) mendukung koordinasi antar para pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.”

c) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lahan pertanian adalah bagian dari bumi yang merupakan nikmat dan rezeki Allah SWT yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat secara berkelanjutan.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada pasal 3 dijelaskan bahwa : “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d) melindungi

kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i) mewujudkan revitalisasi pertanian.”

Republik Indonesia sebagai negara agraris memerlukan jaminan secara legal hukum dan konsisten untuk menyediakan lahan untuk kegiatan pertanian. Lahan pertanian ini dimanfaatkan dan diolah secara berkelanjutan dan menjadi mata pencaharian bagi masyarakat. Disamping itu perlindungan terhadap lahan pertanian dilakukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas pemenuhan kebutuhan rakyat atas pangan yang merupakan hak dasar dan menjadi tanggung jawab atau kewajiban negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A dan Pasal 28C dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)* Dijelaskan bahwa “Upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan dan mendorong terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan dengan penyelenggaraan pembangunan pertanian berkelanjutan.”

Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 9 dijelaskan bahwa : “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan pada: a) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana didasarkan pada: 1) pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; 2) pertumbuhan produktivitas; 3) kebutuhan pangan nasional; 4) kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; 5) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 6) musyawarah petani.”

Lebih lanjut pada pasal 10 dijelaskan bahwa :

“Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang: 1) Perencanaan jumlah produksi

merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, 2). Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.”

Pada pasal 11 dijelaskan bahwa : “Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terdiri terdiri atas: a) perencanaan jangka panjang; b) perencanaan jangka menengah; dan c) perencanaan tahunan.”

Sedangkan pada pasal 12 dijelaskan bahwa : “ Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.”

Pasal 13 dijelaskan bahwa : “Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku dan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.”

Pada pasal 14 dijelaskan bahwa : “ Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan dilakukan berdasarkan: a) inventarisasi; b) identifikasi; dan c) penelitian.” yang diharapkan konsisten dan selaras dengan RTRW sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. (Nugraha AN, Widiatmaka dkk, 2018), (Suryani S dkk, 2020).

d) Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan.

Dinamika perkembangan wilayah perdesaan yang terus mengalami perubahan dalam berbagai bentuk mendorong untuk perlunya perlindungan dan pemberdayaan sehingga posisi desa semakin kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan layanan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang R.I tentang Pedesaan pada pasal 1 dijelaskan bahwa : “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa serta Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

pasal 4 dijelaskan bahwa : “Pengaturan terhadap suatu Desa bertujuan: a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama; e) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; e) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; f) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; g) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan h) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.”

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan pasal 7 dijelaskan bahwa : “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa yang bertujuan: a) mewujudkan

efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d) meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e) meningkatkan daya saing Desa.”

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan pasal 78 dijelaskan bahwa : “ Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.”

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan pasal 79 dijelaskan bahwa : “Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota disusun secara berjangka meliputi: a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.”

pasal 80 dijelaskan bahwa : “ Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah

Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Selanjutnya pada pasal 81 dijelaskan bahwa : “ Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa dimana Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa dan Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pada pasal 82 dijelaskan bahwa : “Untuk Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa, Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.”

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan pasal 83 dijelaskan bahwa : “ Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar - Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.”

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan pasal 84 dijelaskan bahwa : “ Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada pasal 85 dijelaskan bahwa : “ Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa

wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pada pasal 86 dijelaskan bahwa : “ Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud di atas meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sedangkan sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa ini dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. “

- e) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Bangsa Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam oleh Allah SWT yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, termasuk di sector pertanian dan merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional. Sebagai sebuah system dalam pertanian, budidaya tanaman perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan teknologi dan kualitas sumberdaya para petani dan dinamika masyarakat yang semakin maju.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, derap Pembangunan pertanian diarahkan dalam mendorong pertanian yang maju, efisien, dan Tangguh yang hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan perkapita dan perbaikan hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan dan kesempatan kerja, menunjang pembangunan industri dan interkoneksi pembangunan wilayah sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung ekosistem dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan system pertanian yang maju, efisien, tangguh dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan pasal 3 dijelaskan bahwa : “ Penyelenggaraan system

budidaya pertanian berkelanjutan bertujuan untuk : a) meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industry dalam negeri, dan memperbesar ekspor; b) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; dan c) mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pada pasal 4 dijelaskan bahwa : “Pengaturan penyelenggaraan system budidaya pertanian berkelanjutan terdiri atas : perencanaan, tata ruang dan tata guna lahan, penggunaan lahan, pembenihan dan perbibitan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan tanaman benih, bibit dan hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan, panen dan pascapanen, sarana budidaya, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, system informasi, dan peran serta masyarakat.

f) Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 1 dijelaskan bahwa : Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan menjadi Kawasan untuk melaksanakan proses budidaya sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki baik itu potensi SDA, SDM dan sumber daya buatan.

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa : Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menentukan lokasi, dan memberikan rekomendasi pengarahannya pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan dan penyusunan program pembangunan. Didalam RTRW Kabupaten terdapat pula bagian rencana tata ruang perdesaan untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk Kawasan agropolitan.

g. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 74 dijelaskan bahwa : “ Kawasan agropolitan harus memenuhi kriteria: a) kawasan perdesaan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis yang mampu melayani,

menarik, dan mendorong kegiatan agrobisnis di wilayah sekitarnya; b) kawasan perdesaan yang mempunyai kondisi geomorfologi, iklim, dan topografi yang mendukung kegiatan agribisnis di kawasan agropolitan; dan c) kawasan perdesaan yang memiliki dukungan kelembagaan yang mengembangkan kegiatan agribisnis.”

Pada pasal 80 dijelaskan bahwa :

“Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan bagian wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Rencana tata ruang kawasan agropolitan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Rencana tata ruang kawasan agropolitan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada lebih dari satu wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Presiden.”

2. Tinjauan Hukum Islam Perencanaan Kawasan Agropolitan

a) Dampak keberadaan industri terhadap lahan pertanian

Kemajuan industrialisasi yang tidak terbelah oleh dinamika perekonomian dan tidak diiringi dengan pemanfaatan teknologi kersih menimbulkan dampak negative pada lingkungan termasuk perubahan sistem mata pencaharian masyarakat lokal yang awalnya bergerak di sektor pertanian kemudian menjadi pekerjaan di non pertanian, industry dan jasa. Konversi lahan dan perubahan social mempengaruhi produktivitas lahan pertanian. (Maddutana A, 2018).

Al-Qur'an menjelaskan sebuah fenomena yang menjadi realitas terjadinya kerusakan terjadi di bumi ini baik di darat maupun di laut di sebabkan oleh campur tangan manusia. Sebagaimana di dalam Q.S. Ar-Rum/ 30:41 sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Kementerian Agama , RI;2012).

Ayat di atas menggambarkan Allah akan membinasakan sebuah negeri bila suatu kaum menentang perintah-perintah Allah

yang diberikan-Nya. Allah menurunkan bencana agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Kitab suci Al-Qur'an juga menggambarkan tentang lingkungan yang terdapat pada surat Ibrahim ayat 32-34.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ
لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَعَاتِكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ
اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Terjemahnya:

"Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." (Kementrian Agama, RI; 2012).

b) Dukungan Infrastruktur dalam Pengembangan Kawasan Pertanian

Perkembangan perekonomian yang menuntut adanya daya saing global mendorong semua bidang dengan menghadirkan infrastruktur yang mengarahkan dalam upaya perwujudan keunggulan kompetitif dan komperatif termasuk sector pertanian dengan menggunakannya secara baik tanpa merusaknya. (Hayani AS, 2018) Dengan demikian diharapkan untuk senantiasa memeliharanya dan tidak melakukan pengrusakan di muka bumi sesuai firman Allah dalam QS Al-A'raf /7: 56 ;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Kementrian Agama RI, 2013: 158).

Rasulullah Saw. mempertegas bahaya perbuatan merusak dalam sebuah hadist:

عَنْ أَبِي عَمْرٍ وَبْنِ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْزِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abi Amr Ibnu Jubair Ibnu Abdillah, ia berkata, "Rasulullah bersabda,"Barang siapa yang yang berbuat/prakarsa yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahala dari perbuatan/prakarsa itu dan pahala dari orang yang melaksanakan atau menirunya. Dan barang siapa berprakarsa yang jelek, maka ia akan mendapatkan dosa dari prakarsanya itu dan dosa dari orang-orang yang mempraktikkan prakarsanya itu tanpa mengurangi dosa yang menirunya. (HR. Muslim)

c) Evaluasi program agropolitan dalam pengembangan wilayah

Pengembangan kota menengah dan kota kecil diarahkan agar berfungsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan menekan laju migrasi Migrasi penduduk ke kota besar. Dalam perspektif islam ayat di dalam Alquran menegaskan bahwa migrasi yang disebutkan dengan istilah berhijrah diterangkan Allah Subhanahu Wataala dalam firmanNya Al Qur'an Surah An-Nisa/4; 100,

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَاً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

Terjemahannya;

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Kementrian Agama, 2013)

Keterkaitan ilmu pengetahuan agama Islam dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota yaitu menemukan konsep perencanaan dalam mengembangkan suatu wilayah dan kota dengan memperhatikan pertimbangan fisik dan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Dan konsep kawasan agropolitan merupakan bagian dari pengembangan kawasan pertanian yang komprehensif dan melibatkan banyak kepentingan ummat manusia sebagai wujud dari nikmat Allah Swt. berupa lahan. (Alfajrul M, 2020). Hal ini termaktub dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2:29 yang berbunyi ;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan dia mengetahui segala sesuatu.” (Kementrian Agama RI, 2012).

d) Aktivitas pertambangan terhadap pembangunan wilayah

Permasalahan yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal penambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung.

Aktivitas pertambangan saat ini sering dihadapi dalam memanfaatkan bahan galian berharga dari lapisan bumi yang berlangsung sejak lama yang menimbulkan permasalahan yakni kerusakan lingkungan di sekitar aktivitas penambangan dan merusak bentang alam. Al-Quran menegaskan pemanfaatan lahan untuk mendukung aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam QS Al-Hijr/15 : 19-20 sebagai berikut :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Terjemahannya :

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” (Kementerian Agama Republik Indonesia ; 2012)”.

Allah Swt. telah menganugrahkan segala nikmat karunia di permukaan bumi maupun di dalamnya yang senantiasa perlu disyukuri dengan cara menjaga kelestarian alam dengan membangun kehidupan dengan tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan dipatuhi.(Abdullah, 2018).

e) Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan

Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

Pengelolaan dan kelestarian lingkungan menjadi Issu dunia terkait dengan keberlanjutan pembangunan (SDG'S) dan memiliki integrasi kehidupan yang sangat kuat. Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup misalnya memberikan makna yang mendalam dalam mempertahankan kondisi kualitas air dan dimensi-dimensi kehidupan yang lainnya. Manusia dengan kedudukannya sebagai

khalifah berperan sangat strategis dan diberi tanggungjawab besar dalam memberikan kontribusinya untuk mengatur bumi ini dengan segala isinya. Firman Allah dalam QS Al-Baqarah/ 2 : 29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.
(Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 2012).

Tafsir al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt, yang harus disembah dan ditaati yang telah memberikan karunia kepada kalian dengan menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian. (Apriliyanti A,2018).

f) Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan

Pembangunan wilayah perdesaan yang mensinergikan antara kegiatan perkotaan dan perdesaan dalam perwujudan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara desa dan kota antara lain melalui pengembangan agropolitan yang berbasiskan pertanian yang mampu melayani dan mendorong kegiatan agrobisnis/ agroindustry. Pandangan Al-qur'an tentang kondisi sosial ekonomi dalam perspektif upaya peningkatan taraf hidup terdapat dalam ayat Al-qur'an yang telah di jelaskan pada QS. Al-Jumuah/62:10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Berdasarkan ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk berkarya dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menghadirkan penerimaan sesuai dengan bidang yang ditekuni untuk menghidupi pribadi, keluarga dan lingkungan dalam upaya peningkatan taraf hidup. (Ashlihah D, 2020).

Al-Quran sebagai petunjuk yang mengandung prinsip-prinsip untuk keluar dari setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi khususnya dalam pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat. Sehubungan dengan firman Allah dalam Q.S. Ar- Ra'd/13:11 Allah Swt yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahannya :

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

g) Pengembangan wilayah menurut sektor pertanian

Pengembangan wilayah sector pertanian di daerah masing-masing memiliki keunggulan sumber daya yang berbeda yang ditunjukkan oleh pertumbuhan dan peran sub sektor yang bersangkutan. Identifikasi dan klasifikasi sub sektor pertanian diperlukan untuk memberikan gambaran sub sektor mana yang aktifitasnya menjadi basis perekonomian atau unggulan, potensial, sedang berkembang dan mana pula yang tertinggal, sehingga dapat dilakukan penentuan sub sektor prioritas. (Hidayat MF, 2021). Yang juga ditegaskan dalam Q.S. Al-A'raf /7:58 yang berbunyi:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا
نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah Swt, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur” (Kementerian Agama: Al Qur’an dan Terjemahannya).

Pertanian atau bercocok tanam merupakan mata pencaharian yang paling baik menurut para ulama dengan alasan bercocok tanam adalah merupakan hasil usaha tangan sendiri, anjuran islam dalam bercocok tanam dijelaskan juga bahwa agama islam rupanya untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan lahan supaya produktif dengan cara ditanami. Dalam Q.S. An-Nahl/16:10 diingatkan tentang kekayaan flora dan fauna dengan firman-Nya:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ

Terjemahnya:

“Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.”

Para ahli pertanian lebih tahu mengenai apa yang lebih baik bagi pertanian dan lebih tahu apa yang bisa meningkatkan hasil pertanian, sehingga mempelajari ilmu pertanian dan mengembangkannya adalah boleh dan tidak dilarang oleh Allah Swt.

h) Pengembangan Wilayah dengan Pendekatan Agrowisata

Kebijakan ketahanan pangan di daerah yakni mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah termasuk pengembangan agrowisata yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana walaupun saat ini masih ditandai oleh rendahnya

aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Agama islam mengajarkan akan pentingnya pemeliharaan lingkungan khususnya mensyukuri nikmat Allah dengan tidak merusak lingkungan khususnya dalam mendorong pengembangan wilayah dengan pendekatan agrowisata. (Faisah N,2019). Sebagaimana juga dipertegas dalam QS. Al-Hijr/ 15:19-21.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

Terjemahnya:

"19. dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

20. dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.

21. dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu."

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah bertanggung jawab dalam memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya yang bertujuan dalam melestarikan alam yang pada gilirannya memberikan manfaat dalam menopang kelangsungan hidup hingga generasi selanjutnya sesuai yang terdapat dalam QS. Hud : 61

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Terjemahannya :

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali

tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

i) Kegiatan agroteknologi terhadap pengembangan wilayah

Penyelenggaraan pengembangan wilayah menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya dengan mendorong potensi dan keunggulan sumberdaya wilayah dan dukungan teknologi serta berpegang dan konsisten dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. (Rahmiati, 2019). Hal ini telah ditegaskan dalam surah, Al-Mu'minun (23-19).

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاقٍ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya :

"Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur; di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan."
(Al-Qur'an dan Terjemahannyanya, Surah Al-Mu'minun ayat 19).

Manusia dalam memanfaatkan makhluk dan segala ciptaan Allah SWT di muka bumi ini tetap bersandar terhadap aturan-aturan agama. Dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya apapun yang diciptakan oleh Allah SWT harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat bermanfaat bagi manusia serta alam semesta.

Kegiatan pertanian telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. Salah satu hadis tentang bercocok tanam yang memperkuat Al-Qur'an Surah Yaasin ayat 33, 34 dan 35 adalah hadits dari Anas Bin Malik Rodhiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda :

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا
كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya :

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Imam Bukhari hadits No.2321:1995).

BAB IV

PENDEKATAN PENATAAN RUANG KAWASAN AGROPOLITAN

1. Pendekatan Penataan Ruang

Pendekatan penataan ruang dalam kajiannya dapat melihat beberapa aspek penggunaan ruang yang dilakukan secara terpadu, yaitu dengan menilai struktur ruang dan pola ruang pada kawasan/wilayah perencanaan; serta menjaga kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dalam memanfaatkan ruang dalam kawasan dengan fungsi dan daya dukung kawasan berdasarkan hasil analisis aspek fisik lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Hal ini diperlukan karena lahan pengembangan wilayah merupakan sumber daya yang memiliki keterbatasan dalam menampung aktivitas dan keberlanjutan sumber daya yang tersedia.

2. Pendekatan Keterbukaan

Melakukan analisis secara terpadu dan saling mendukung antara ketiga aspek yaitu fisik lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya.

a) Aspek fisik lingkungan

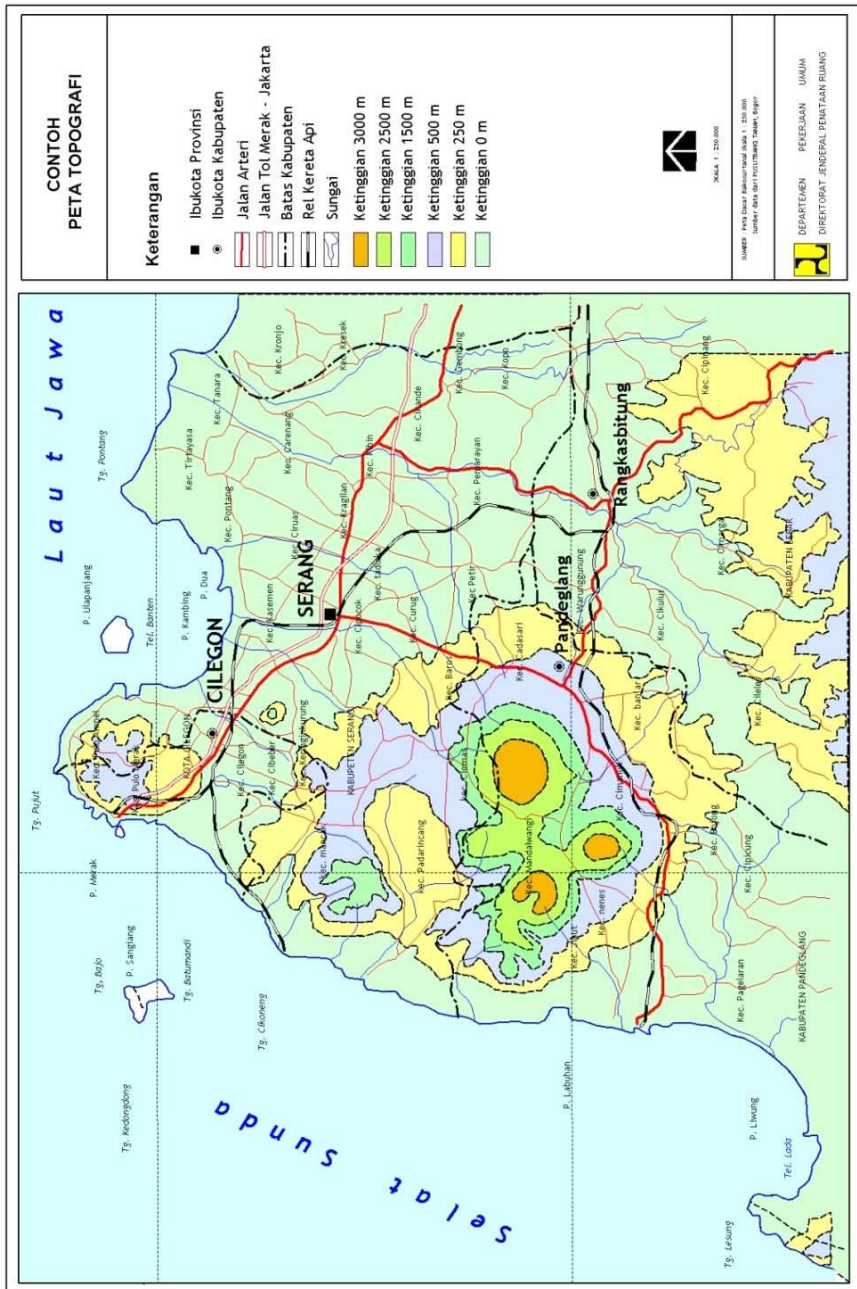
Beberapa data-data yang digunakan dalam analisis fisik lingkungan adalah:

➤ Klimatologi

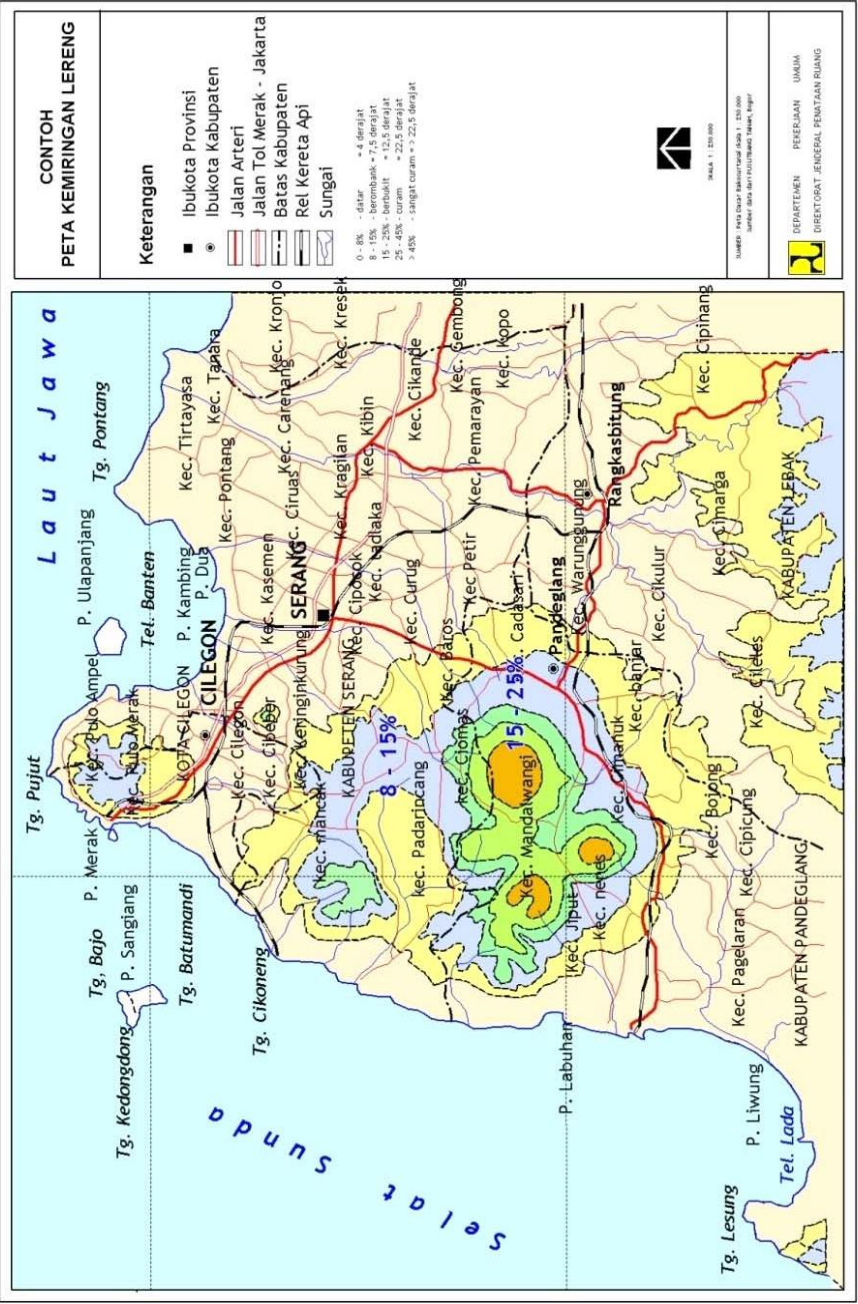
Informasi klimatologi berupa data iklim berdasarkan hasil pengamatan pada stasiun pengamat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang meliputi: a) curah hujan dan intensitasnya, b) suhu, c) Kelembaban, d) arah dan kecepatan angin dan d) Lama penyinaran (durasi) matahari

➤ Topografi

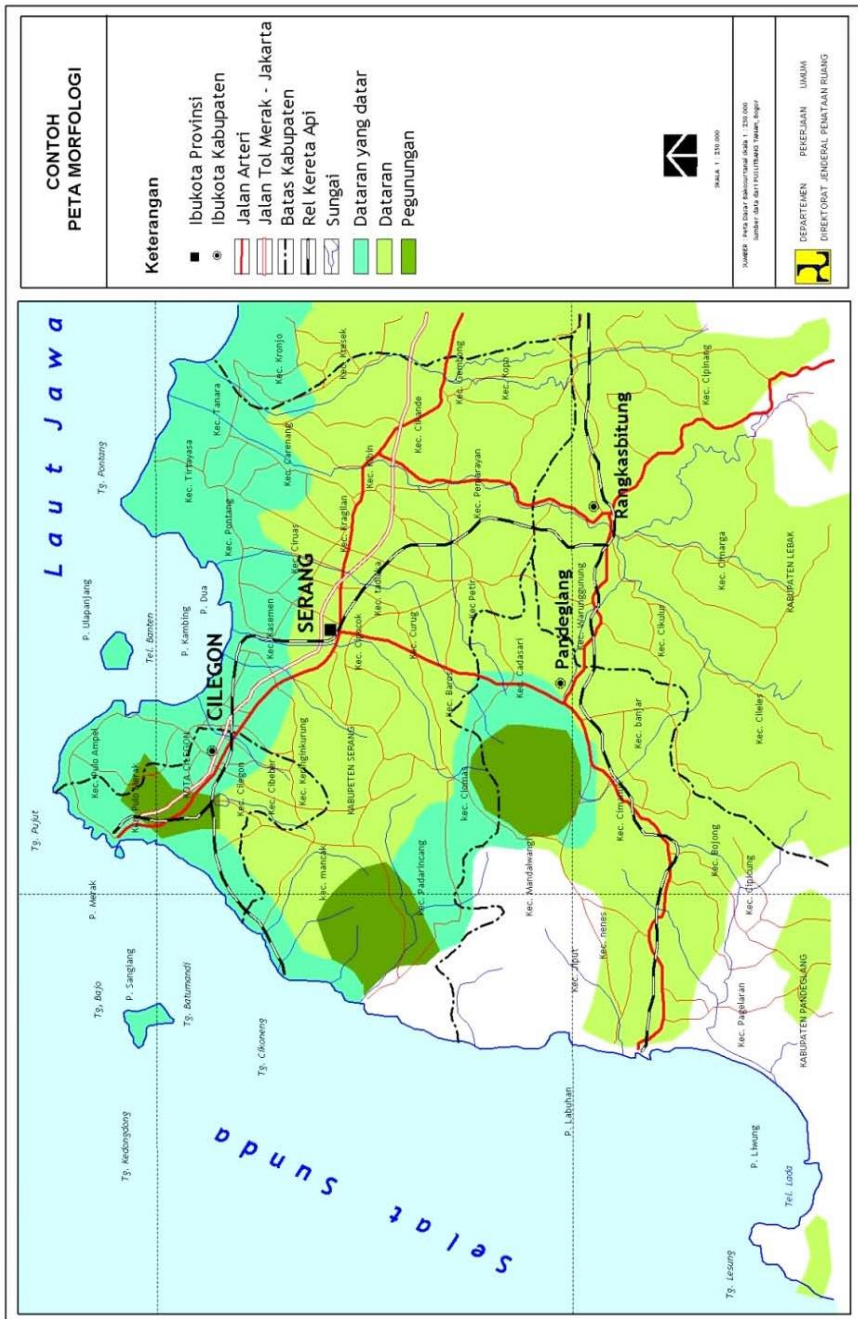
Topografi merupakan bentuk permukaan bumi yang berupa peta topografi dengan skala terbesar yang tersedia, Peta ini dapat diperoleh pada instansi: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Topografi-TNI Angkatan Darat, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi terkait lainnya. Berikut contoh peta topografi dan kemiringan lereng dan morfologi.



Gambar 3. Peta topografi



Gambar 4. Peta Kemiringan Lereng



Gambar 5 Peta Morfologi

➤ Geologi

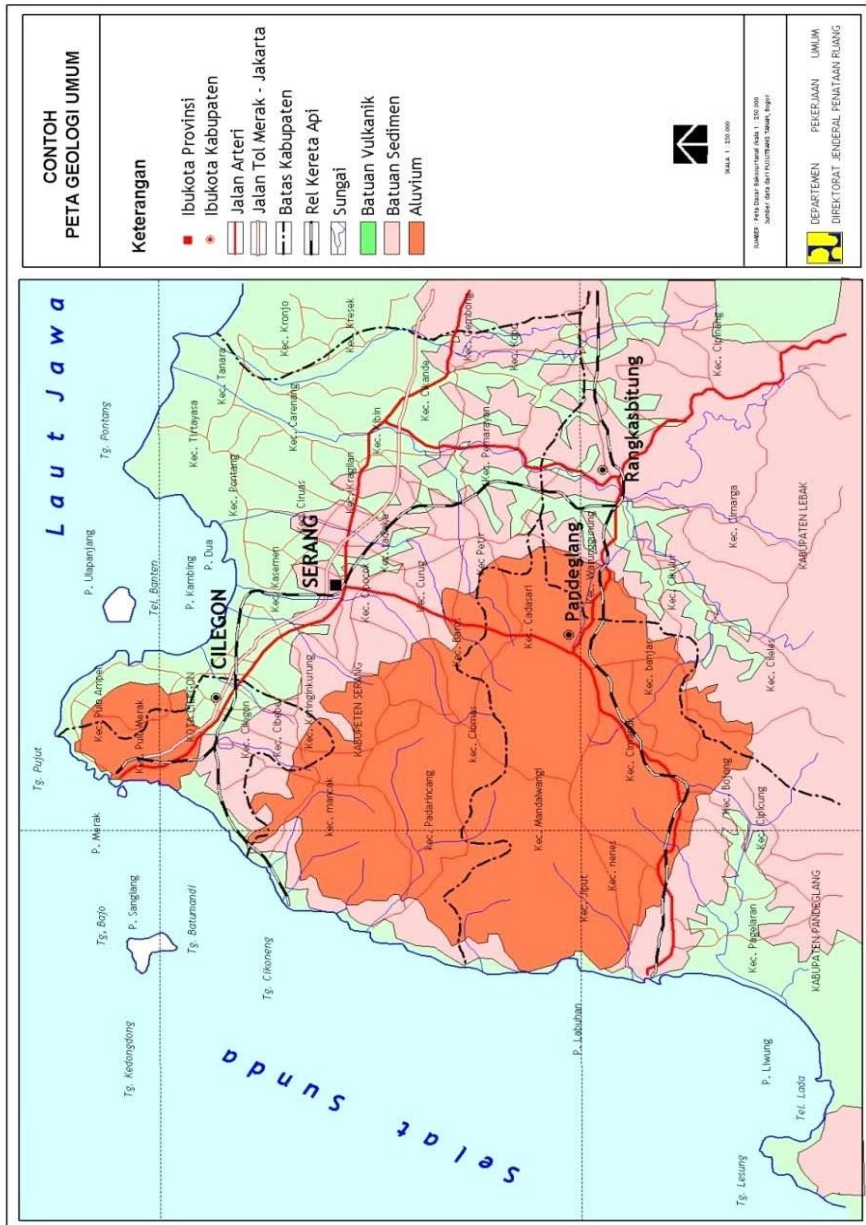
Data geologi sangat bermanfaat dalam melakukan perencanaan terhadap suatu wilayah. Data geologi yang diperlukan dalam analisis aspek fisik dan lingkungan terdiri dari tiga bagian yakni data geologi umum, geologi wilayah dan data geologi permukaan.

Perencanaan dalam kawasan agropolitan bersifat geologi tinjau yang dalam kejiannya berpegang pada geologi umum dan lebih menekankan pada karakteristik litologi dan struktur geologi secara rinci dan tidak mengabaikan stratigrafi serta unsur geologi lainnya.

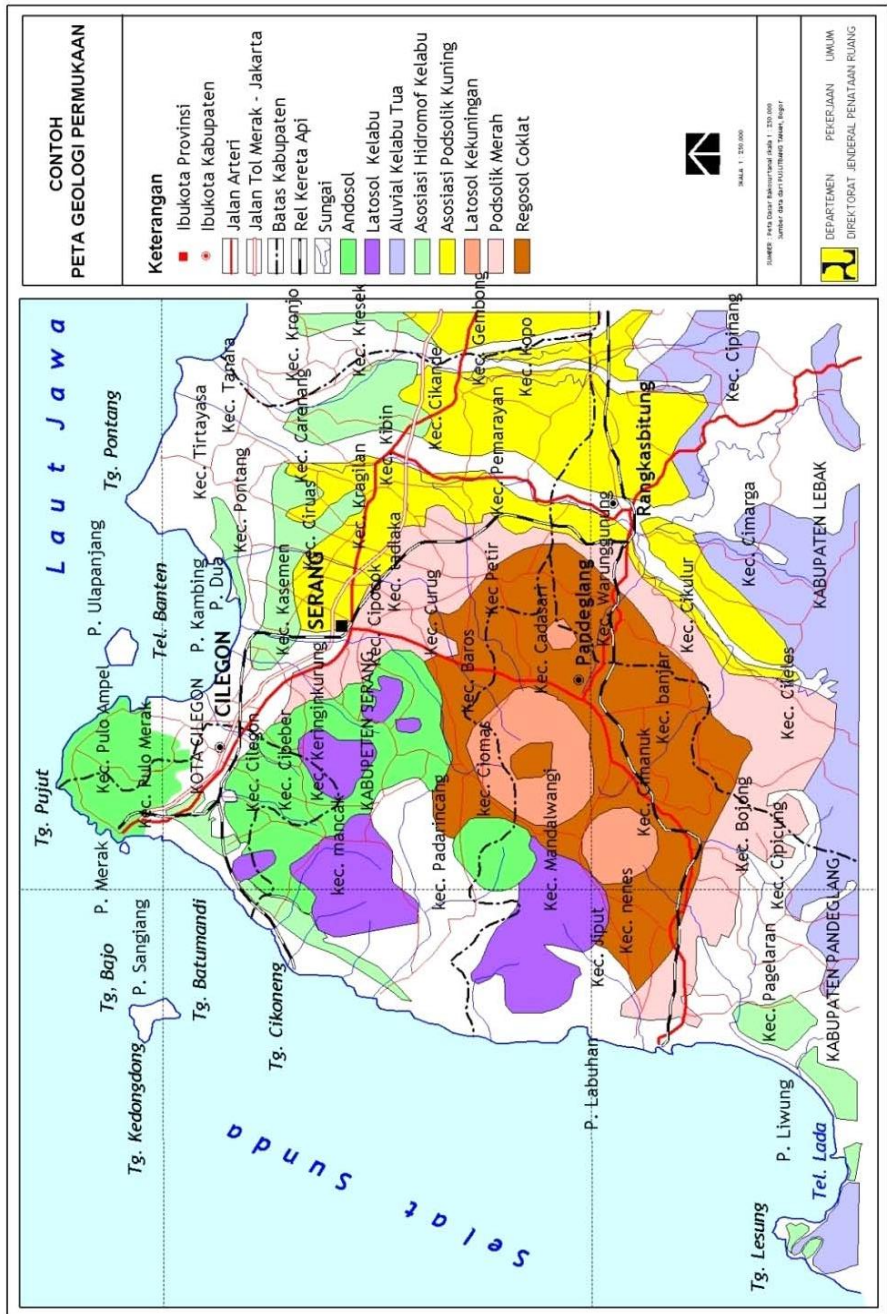
Geologi permukaan merupakan kondisi geologi tanah atau bebatuan yang terdapat di atas permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar, serta sifat-sifat keteknikan dari tanah dan bebatuan tersebut untuk menunjang pengembangan kawasan.

Untuk mendapatkan data dari geologi permukaan, hanya dapat diperoleh dari survei dan penelitian langsung dilapangan untuk mendapatkan data primer. Data sebaran vertikal diperoleh berdasarkan hasil pemboran dangkal sedangkan sifat keteknikan dapat disajikan melalui pengamatan mengaskopis untuk efisiensi biaya dan waktu. Untuk daya dukung tanah dan bebatuan dapat dilakukan lebih spesifik dari hasil pengujian sondir.

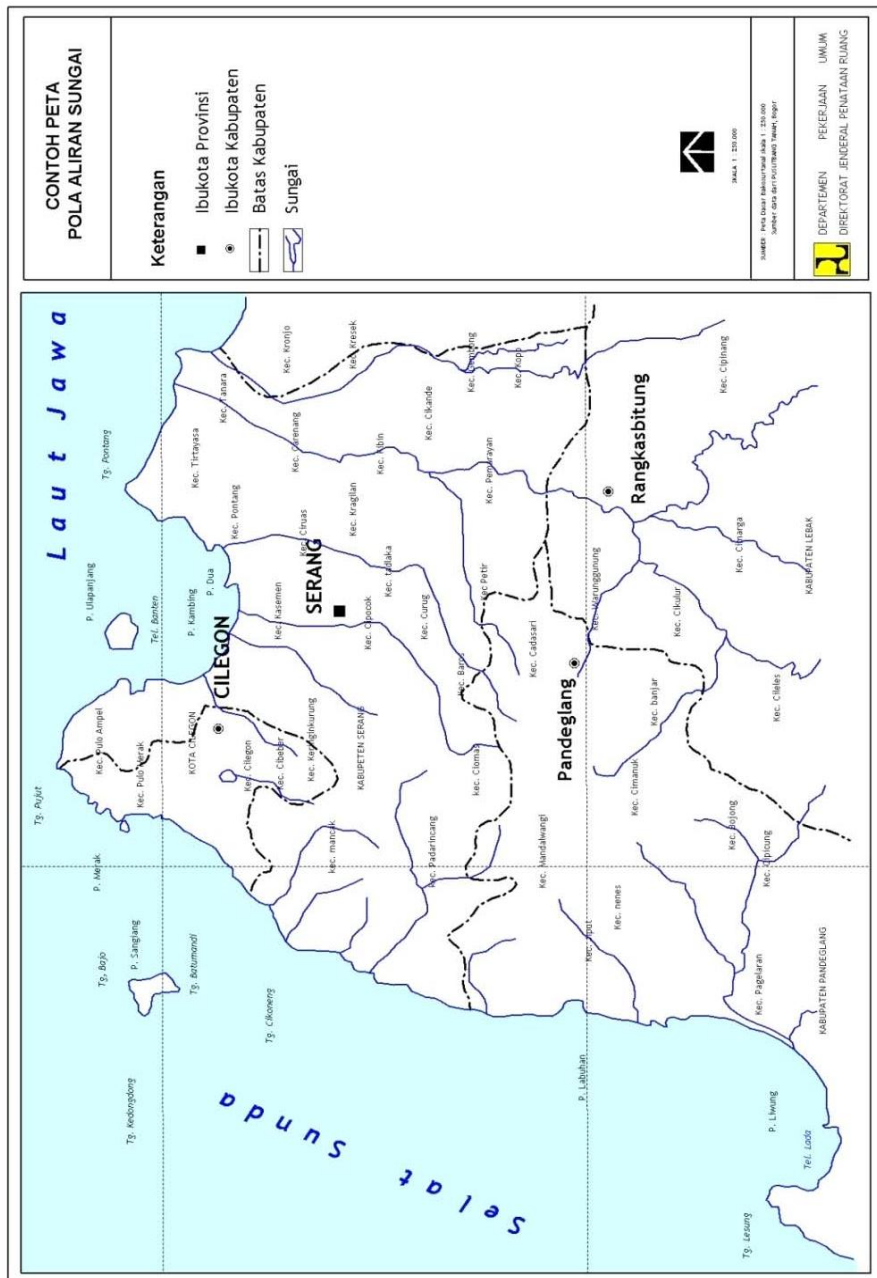
Berikut contoh peta geologi umum dan geologi permukaan serta contoh peta pola aliran sungai.



Gambar 6. Contoh peta geologi umum



Gambar 7. Contoh peta geologi permukaan



Gambar 8. Contoh peta pola aliran sungai

➤ Hidrologi

Hidrologi menjelaskan tentang pergerakan, distribusi dan kualitas air. Data hidrologi berupa data yang berkaitan dengan kondisi air, baik air permukaan maupun air tanah. Air permukaan adalah air yang keluar atau mengalir di permukaan tanah. Seperti; danau, mata air, sungai dan rawa. Data air permukaan dari masing-masing jenis sumber air tersebut hendaknya diikuti dengan jumlah besaran atau debitnya, sehingga dapat tergambarkan potensi air permukaan secara umum, sedangkan air tanah adalah air yang tersimpan dan mengalir di bawah permukaan tanah.

➤ Sumber Daya Mineral/Bahan Galian

Dalam penyusunan rencana tata ruang, perlu diketahui sumber daya mineral/bahan galian termasuk bahan galian golongan C, minyak bumi, batubara, dan mineral logam yang terdapat dalam wilayah perencanaan.

➤ Bencana Alam

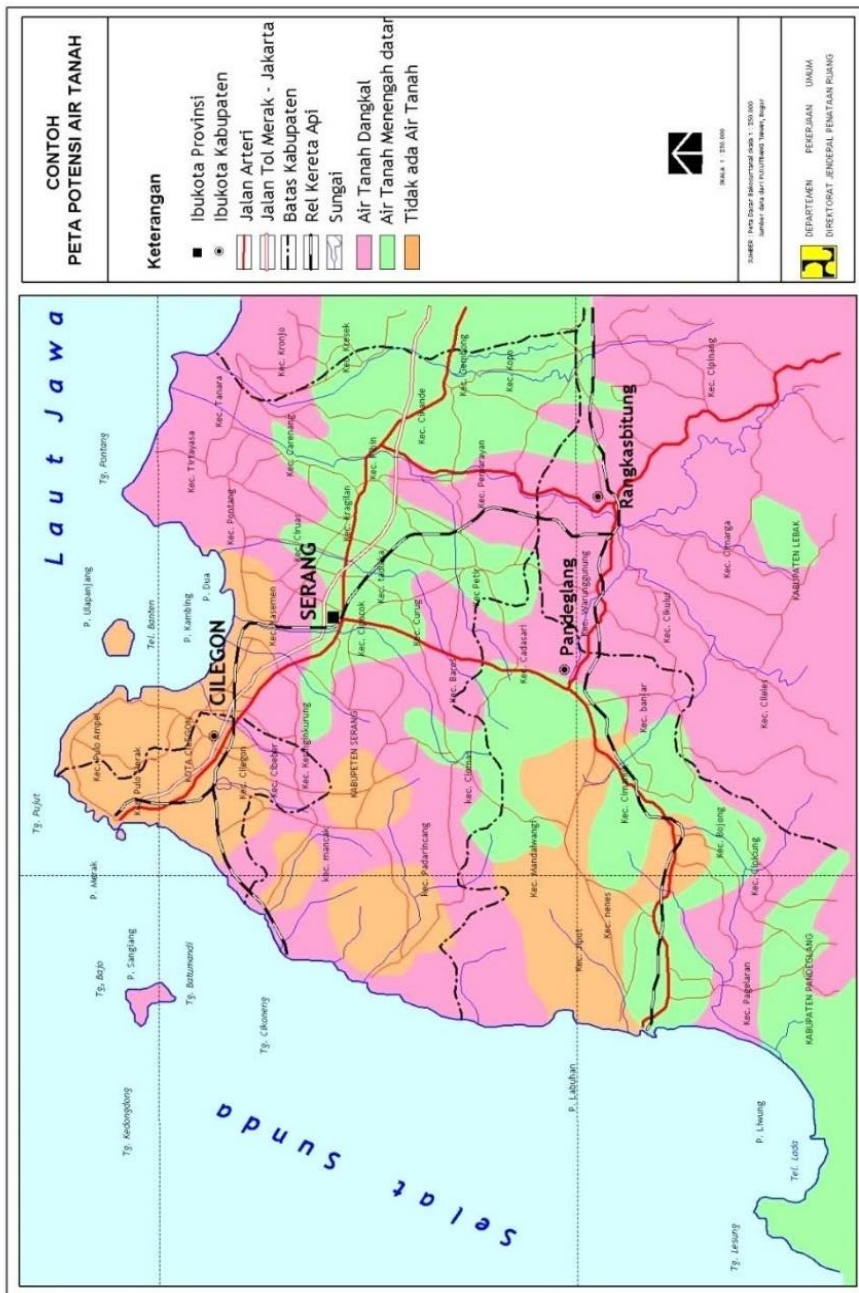
Pada dasarnya bencana alam merupakan gejala atau proses alam yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu baik oleh proses alam itu sendiri ataupun akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Kemungkinan terjadinya bencana atau daerah rawan bencana alam pada kawasan yang akan dikembangkan perlu dikenali sedini mungkin, untuk dapat dihindari melakukan pengembangan pada daerah rawan bencana atau dapat melakukan pengamanan ataupun mitigasi pada daerah yang akan dikembangkan.

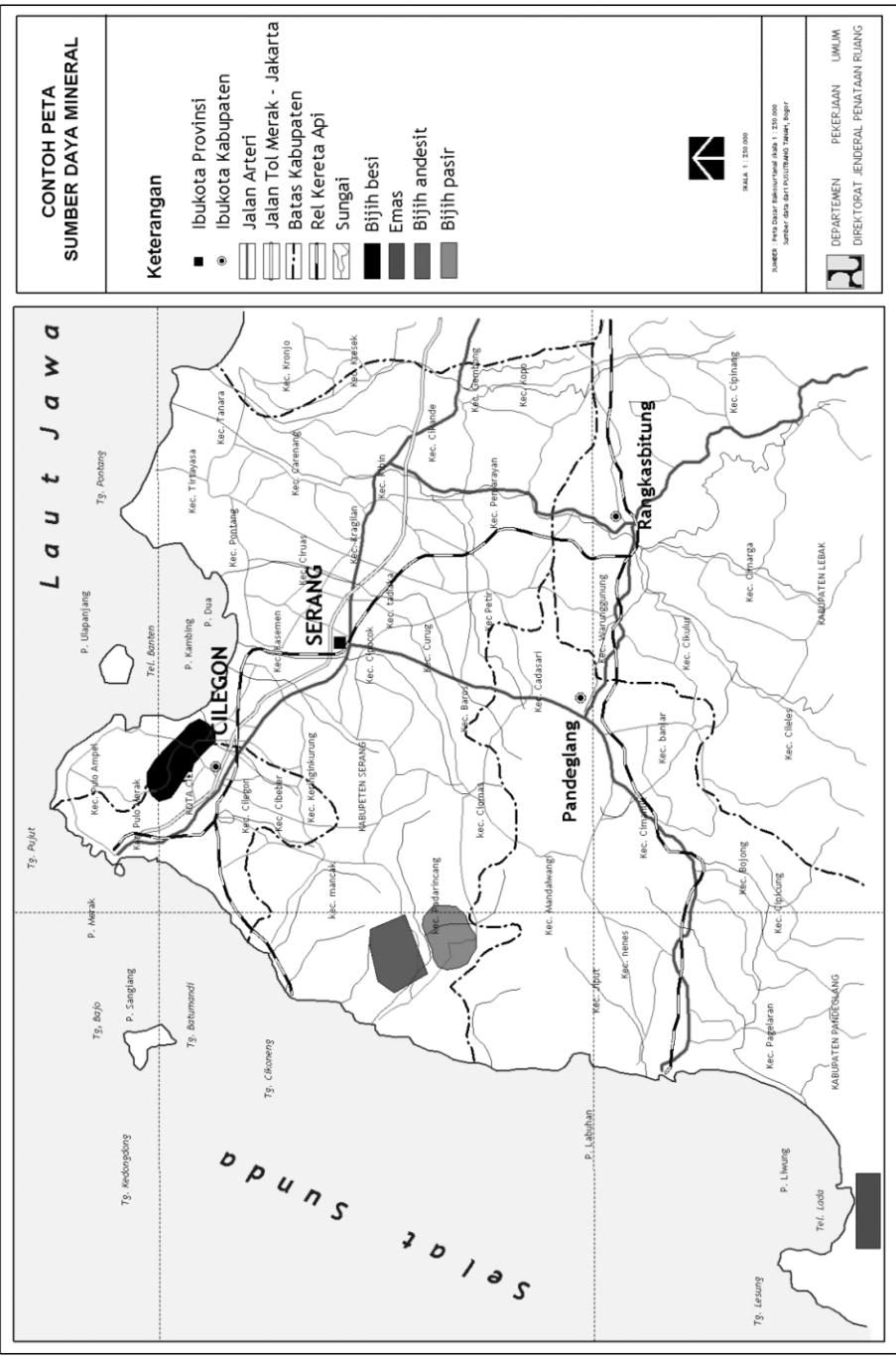
Jenis bencana alam yang dapat timbul di suatu daerah, pada dasarnya dapat dikenali dari kondisi geologi, sejarah bencana alam yang pernah terjadi di daerah tersebut dan gejala bencana alam dalam bentuk lokal atau mikro yang kemungkinan akan meluas atau merupakan indikasi terjadinya bencana yang lebih makro..

Beberapa bencana alam yang terjadi dan dapat menimbulkan aspek geologi seperti banjir, longsor/gerakan tanah, amblesan, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan dan lainnya.

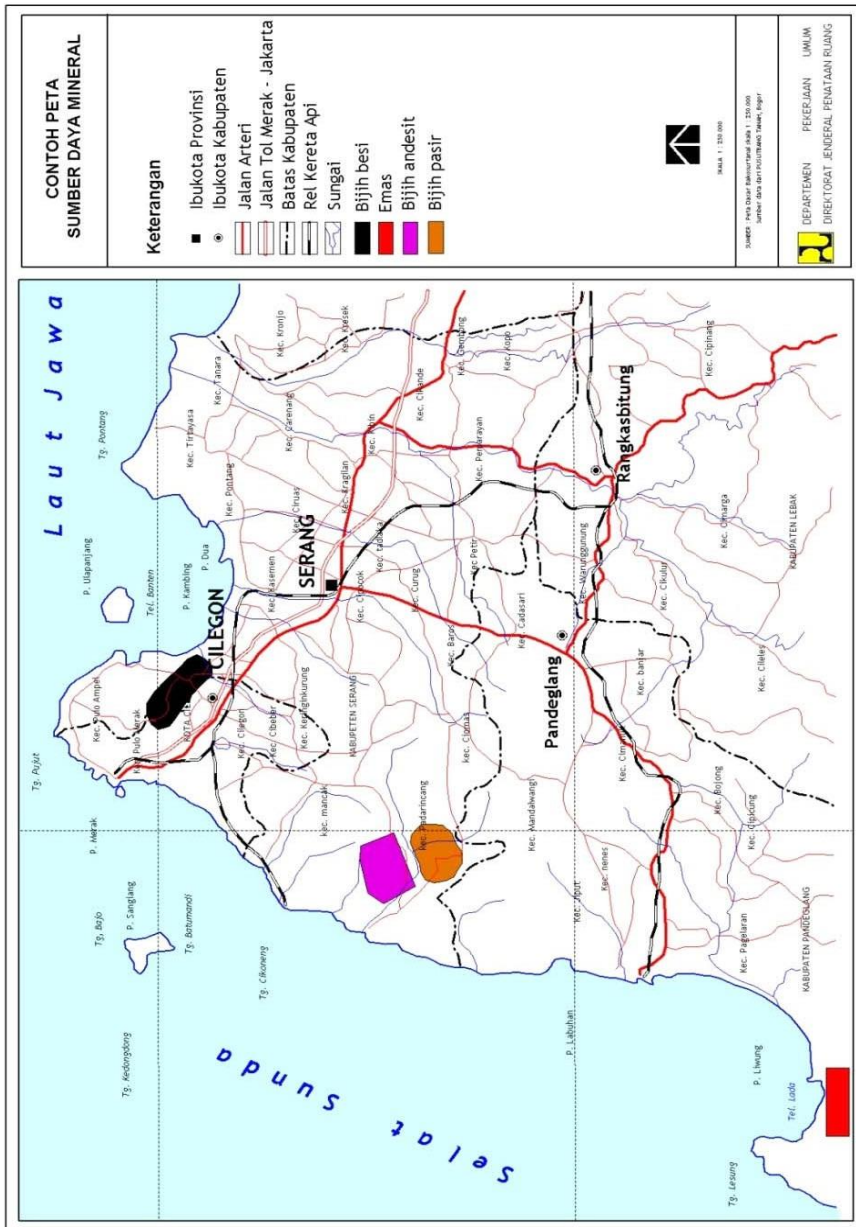
Berikut contoh peta potensi air tanah dan peta sumber daya mineral:



Gambar 9. Contoh peta potensi air tanah



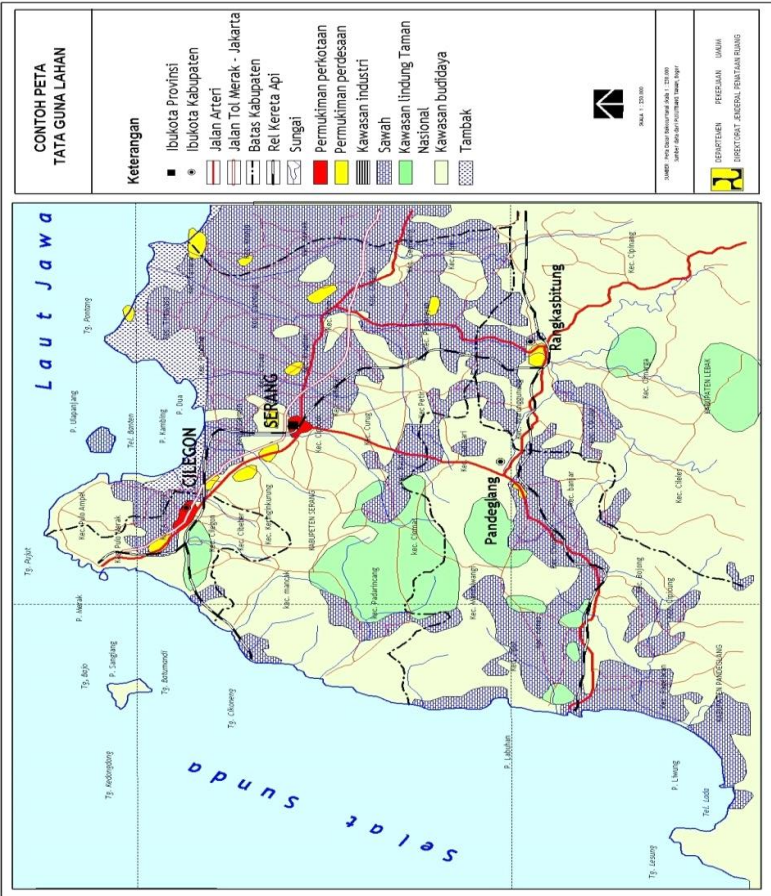
Gambar 10. Contoh peta sumber daya mineral



Gambar 11. Contoh peta sumber daya mineral

➤ Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah dan/atau kawasan perencanaan perlu diketahui secara terinci sebelum dilakukan pengembangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui rasio tutupan lahan di wilayah atau kawasan tersebut, juga untuk mengetahui pengelompokan peruntukan lahan, termasuk fasilitas yang ada di dalamnya. Sehingga nantinya akan membentuk pusat kota, bangunan-bangunan yang memerlukan persyaratan kemampuan lahan tinggi dan fasilitas lainnya yang akan dikembangkan dalam wilayah dan atau kawasan. Perencanaan penggunaan lahan ini akan digunakan dalam penentuan rekomendasi kesesuaian lahan. Berikut contoh peta penggunaan lahan.

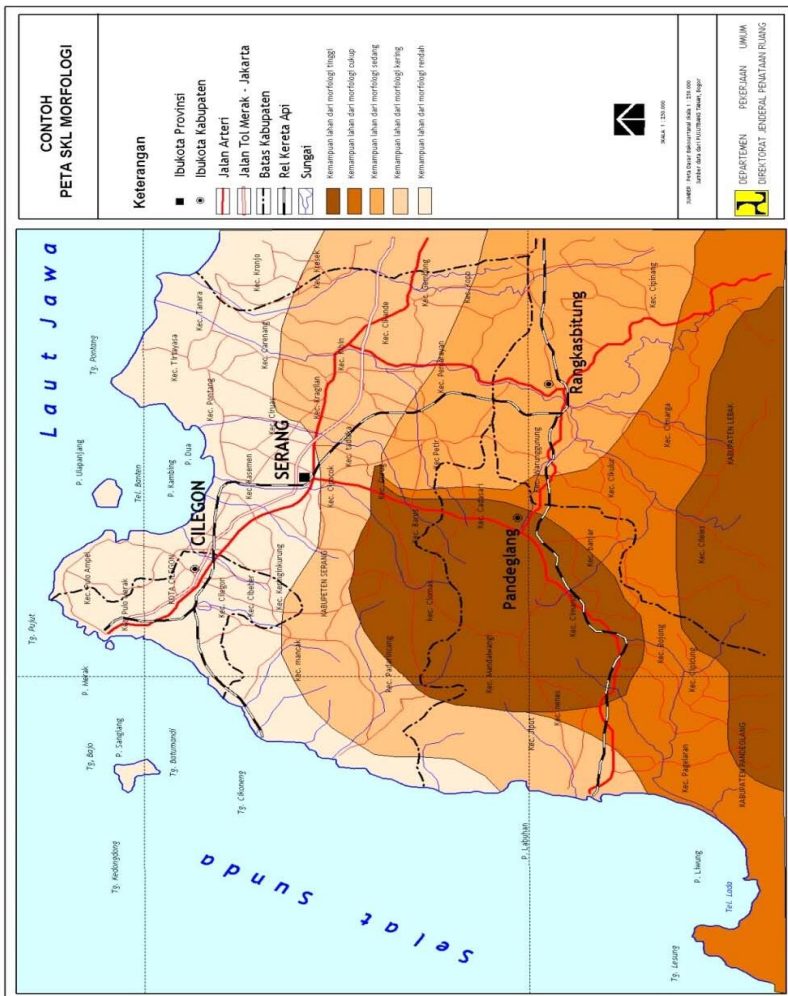


Gambar 12. Contoh peta penggunaan lahan

Analisis kemampuan lahan

➤ Satuan kemampuan lahan (SKL) morfologi

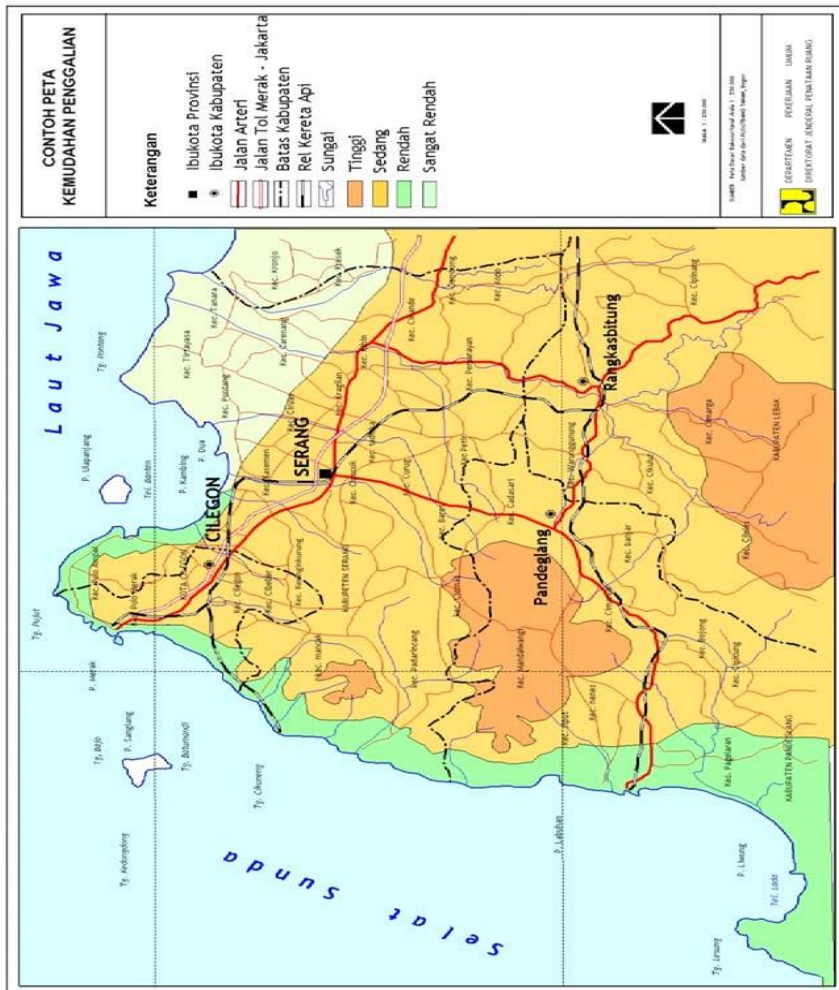
Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan dilihat dari segi morfologinya dan untuk mengetahui potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan kemampuan lahan. Berikut contoh peta satuan kemampuan lahan (SKL morfologi).



Gambar 13. Contoh peta SKL morfologi

➤ Satuan kemampuan lahan (SKL) kemudahan penggalian

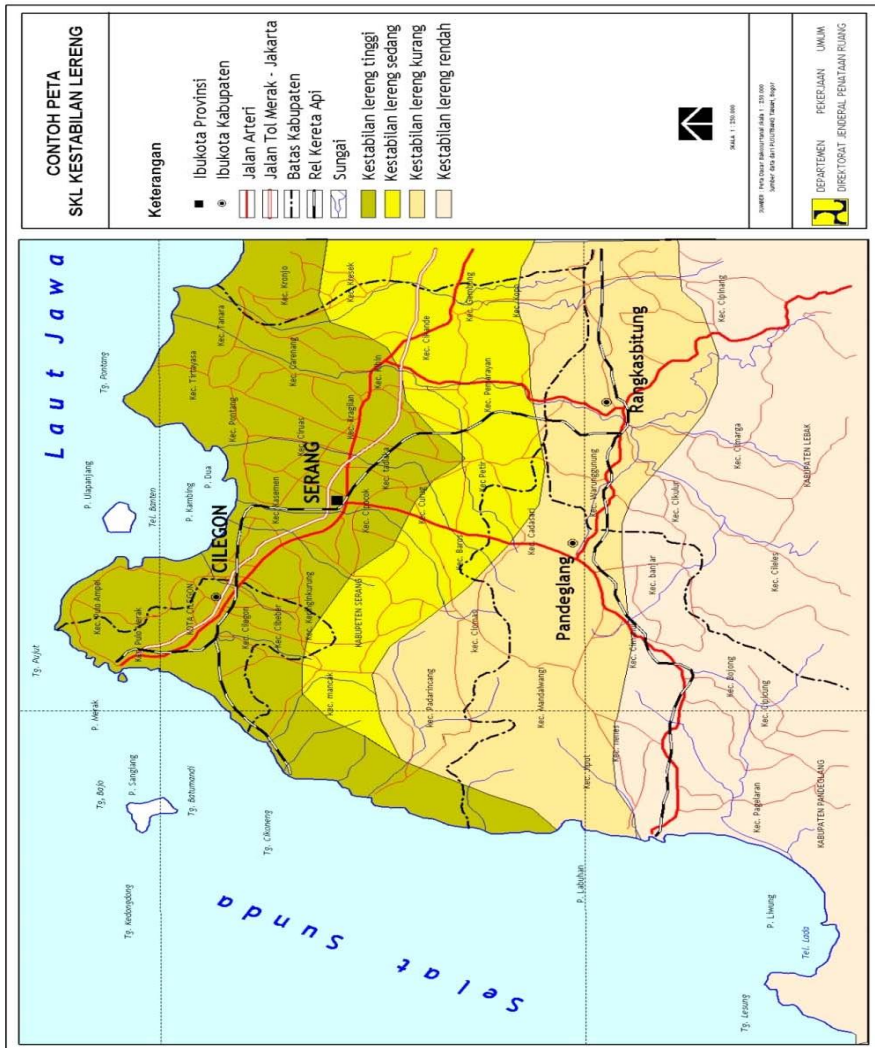
Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk digali, ditimbun, ataupun dimatangkan, potensi dan kendala dalam pelaksanaan pengerjaan masing-masing tingkat kemampuan lahan, dan mengetahui metode pengerjaan yang sesuai untuk masing-masing tingkatan kemampuan lahan dalam proses pembangunan untuk pengembangan kawasan. Berikut contoh peta satuan kemampuan lahan (SKL kemudahan penggalian).



Gambar 14. Contoh peta SKL kemudahan penggalian

➤ Satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan lereng

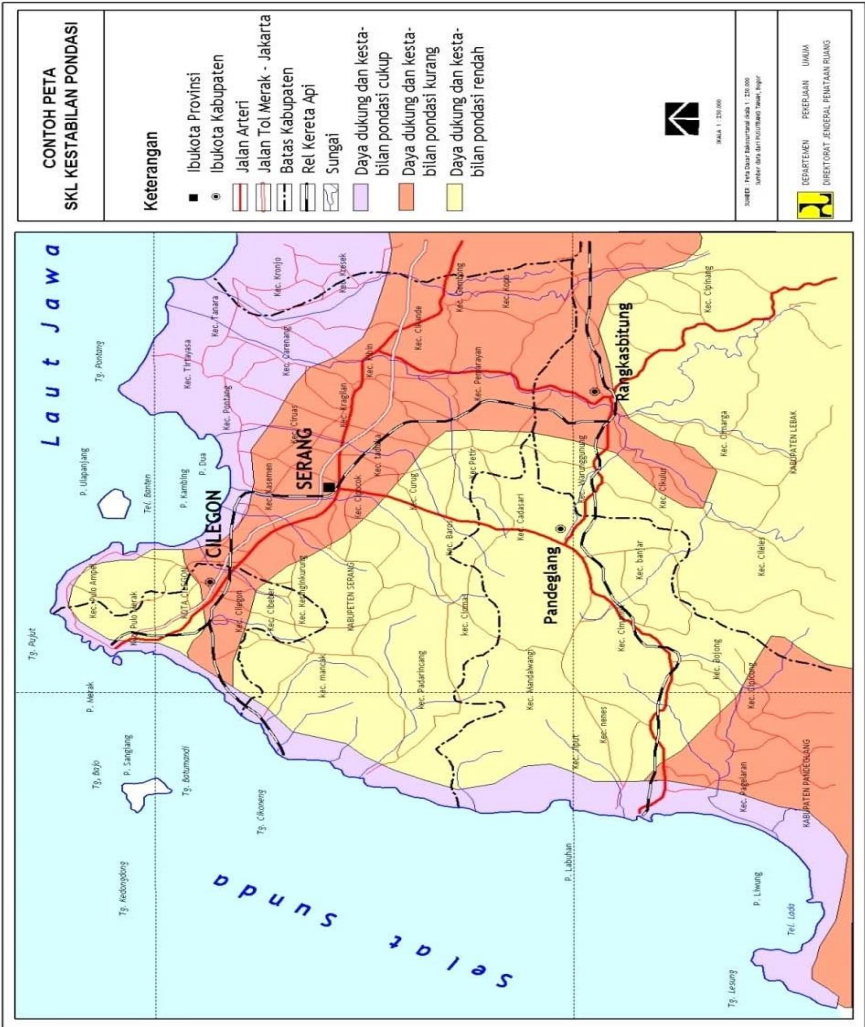
Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kestabilan lereng melakukan identifikasi daerah yang berlereng cukup aman dan batasan pengembangan pada masing-masing tingkatan kestabilan lereng. Berikut contoh gambar peta satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan lereng.



Gambar 15. Contoh peta SKL kestabilan lereng

➤ Satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan pondasi

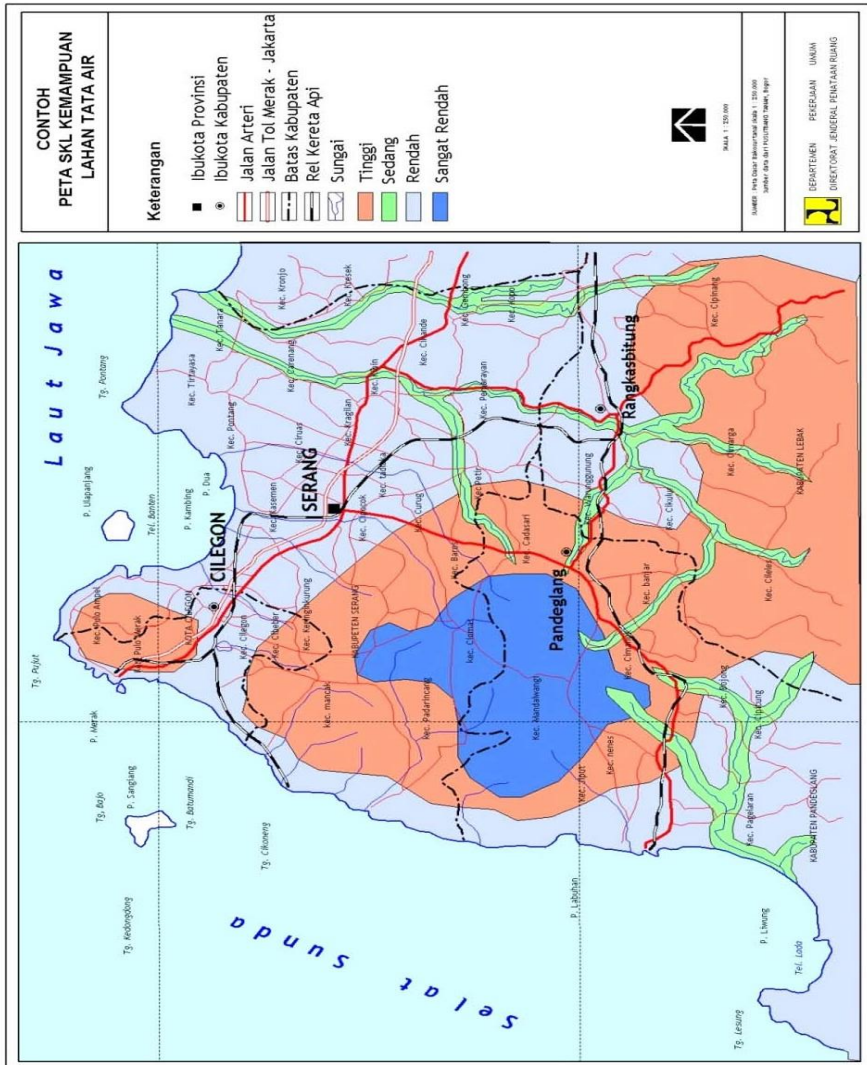
Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk mengetahui dan memperkirakan jenis pondasi dari masing-masing jenis dan daya dukung tanah yang terdapat dalam wilayah dan atau kawasan dan tingkat kestabilan pondasi di wilayah dan atau kawasan yang akan direncanakan dan dikembangkan. Berikut contoh peta satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan pondasi.



Gambar 16. Contoh peta SKL kestabilan pondasi

➤ Satuan kemampuan lahan (SKL) ketersediaan air

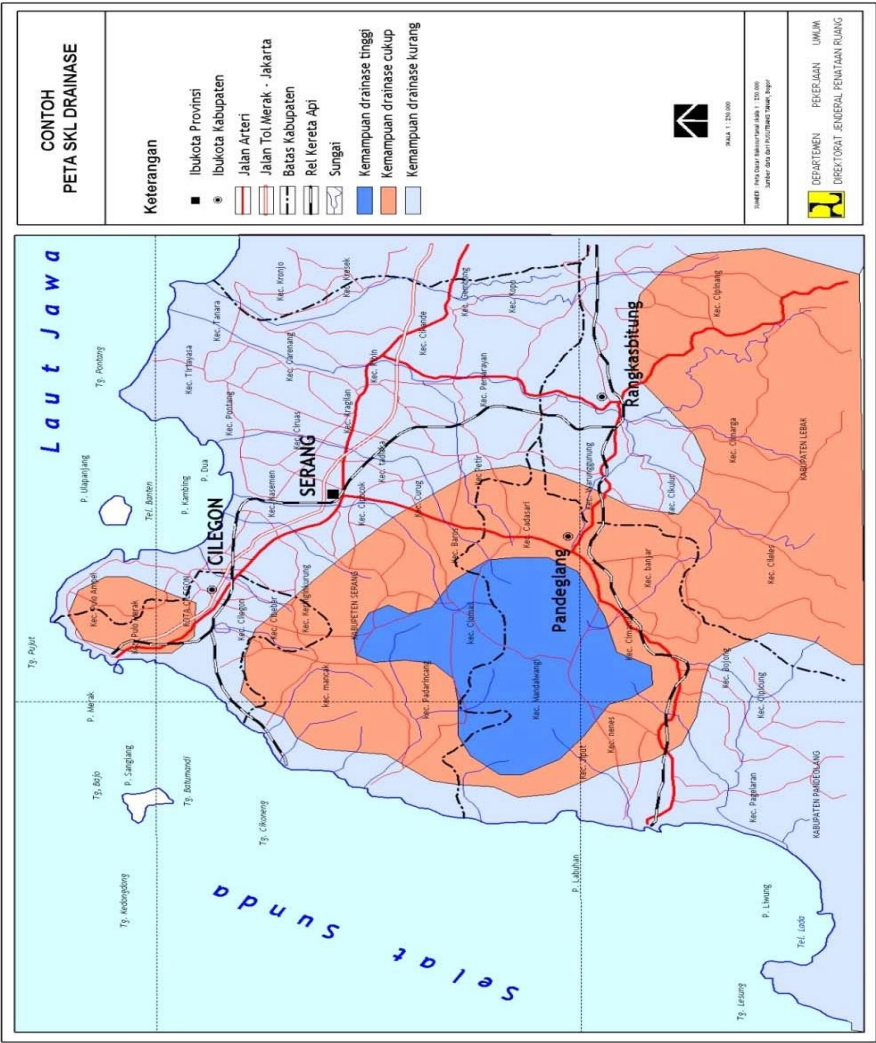
Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk melihat gambaran rasio ketersediaan air, kapasitas air untuk pengembangan wilayah dan atau kawasan dan sumber-sumber air yang tersedia dan bisa dimanfaatkan dalam pengembangan wilayah dan atau kawasan. Berikut contoh peta satuan kemampuan lahan (SKL) ketersediaan air.



Gambar 17. Contoh peta SKL kemampuan ketersediaan air

➤ Satuan kemampuan lahan (SKL) untuk drainase

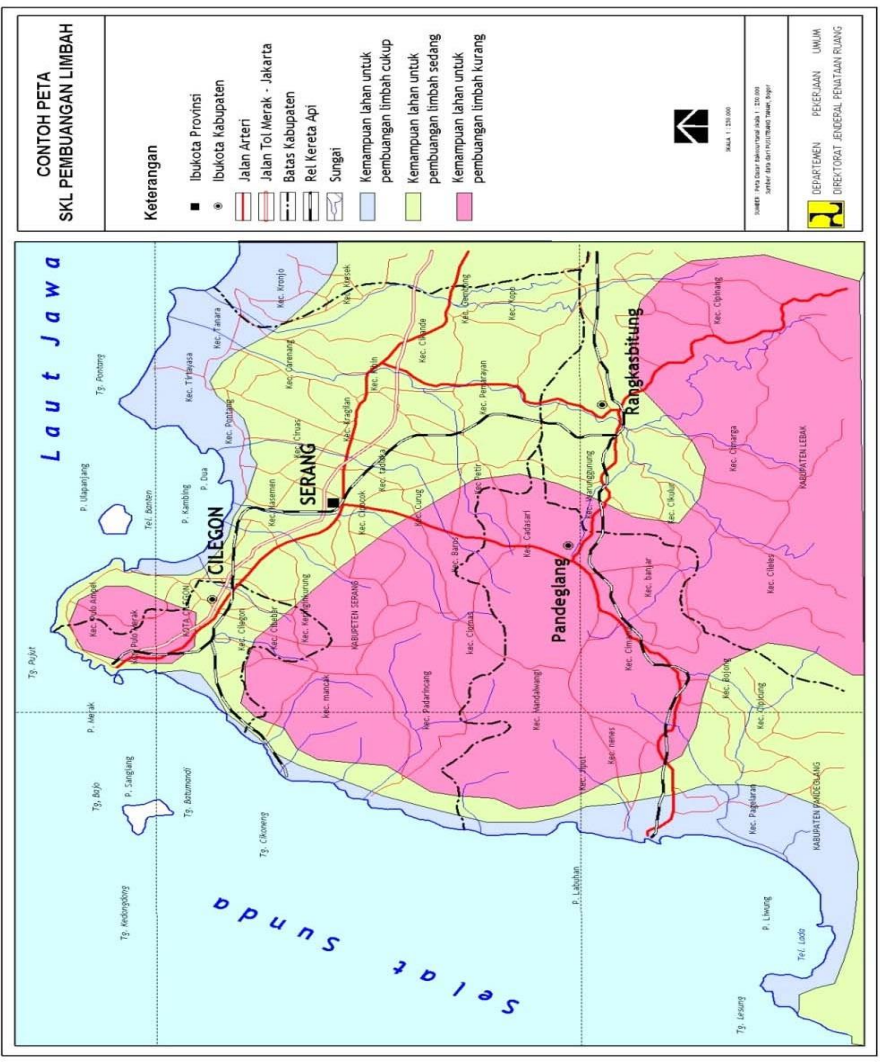
Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam proses pematuan, gambaran karakteristik drainase alamiah dan mengetahui kecenderungan daerah yang tergenang pada musim penghujan. Berikut contoh peta satuan kemampuan lahan (SKL) untuk drainase.



Gambar 17. Contoh peta SKL drainase

➤ Satuan kemampuan lahan (SKL) pembuangan limbah

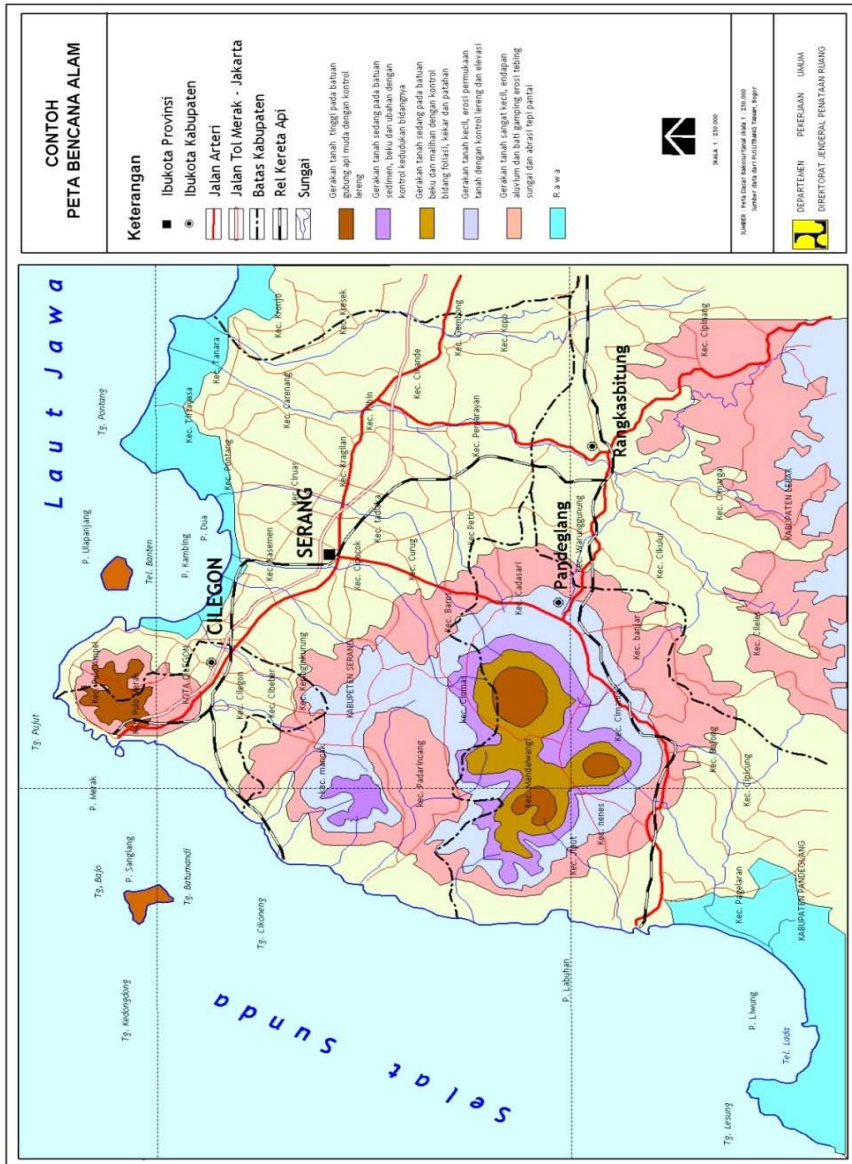
Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk mempersiapkan daerah sebagai lokasi pembuangan akhir, baik lokasi tempat penampungan akhir sementara maupun permanen dan tempat pengolahan limbah atau sampah. Berikut contoh peta satuan kemampuan lahan (SKL) pembuangan limbah.



Gambar 19. Contoh peta SKL pembuangan limbah

➤ Satuan kemampuan lahan (SKL) terhadap bencana alam

Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah mengetahui pola pengembangan dan pengamanan masing-masing tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam. Berikut contoh peta satuan kemampuan lahan (SKL) terhadap bencana alam.

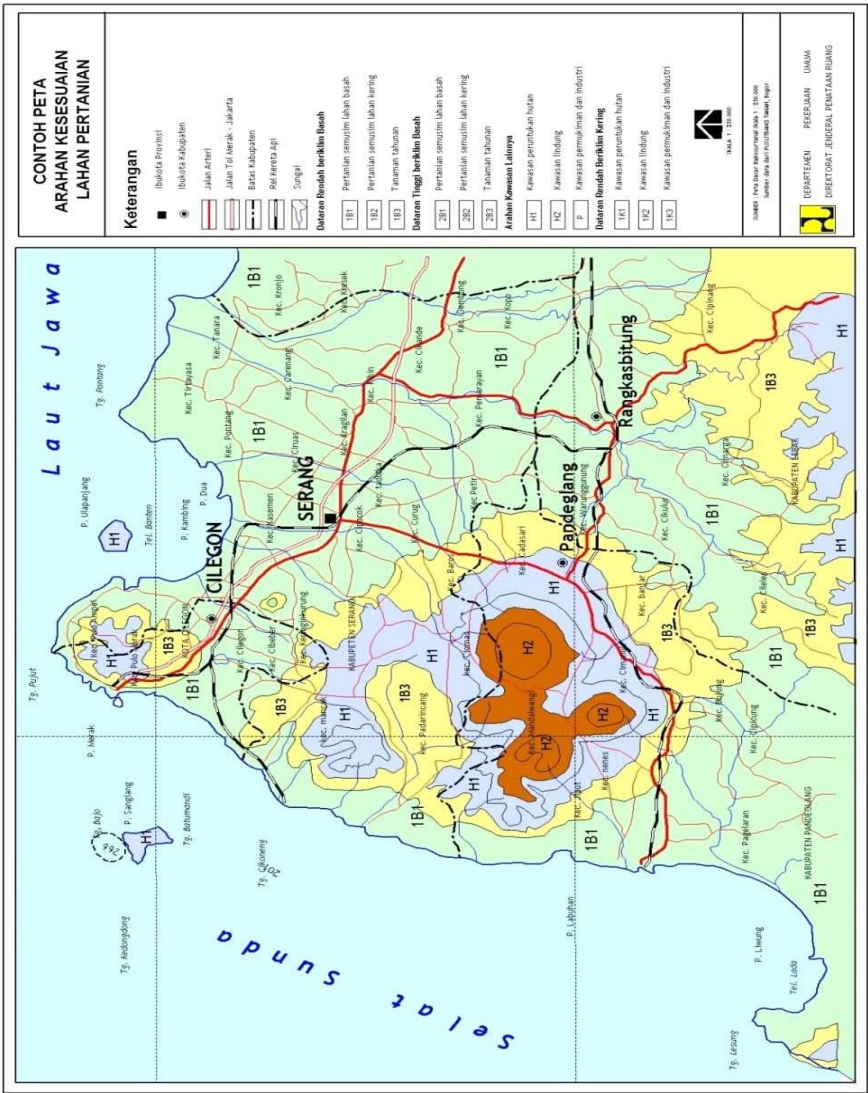


Gambar 20. Contoh peta SKL bencana alam

Analisis kesesuaian lahan

➤ Arahan kesesuaian lahan pertanian

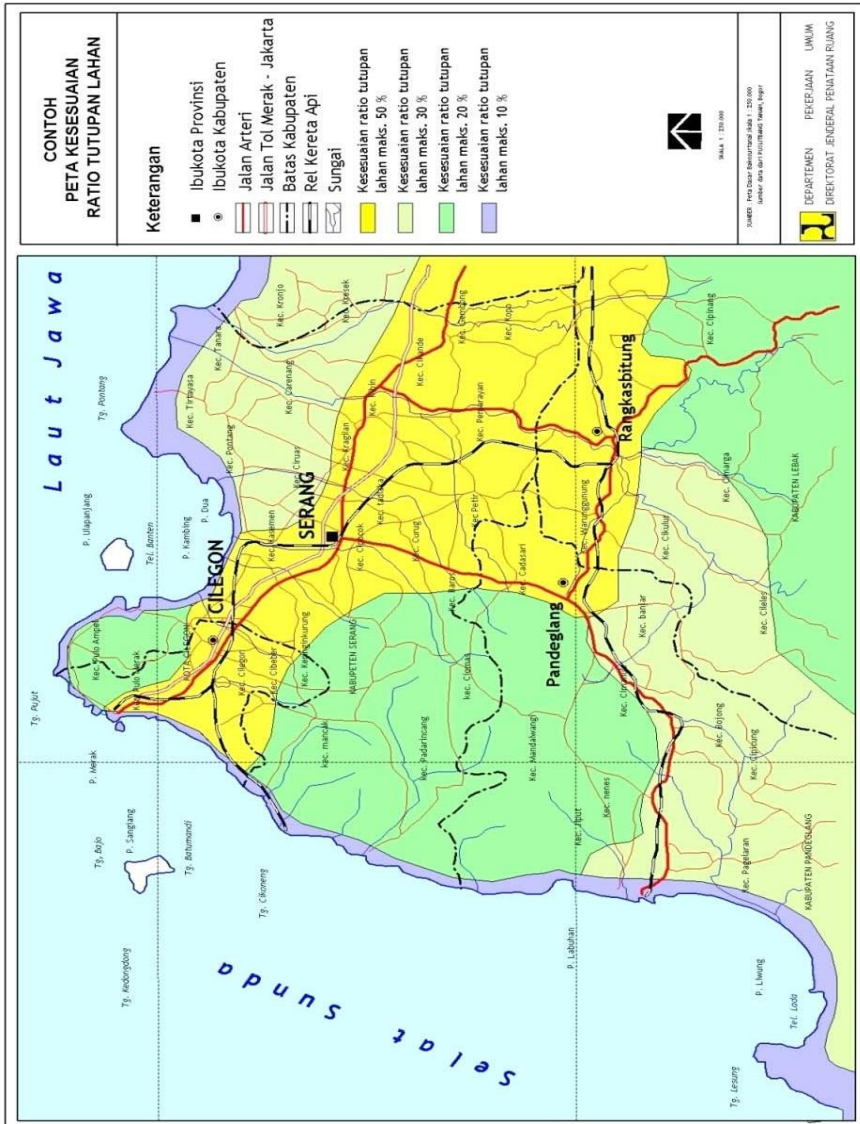
Arahan kesesuaian lahan pertanian di Indonesia dapat dilihat pada Atlas dengan Skala 1:1.000.000. Berikut contoh peta arahan kesesuaian lahan pertanian.



Gambar 21. Contoh peta arahan kesesuai lahan pertanian

➤ Arahan rasio tutupan

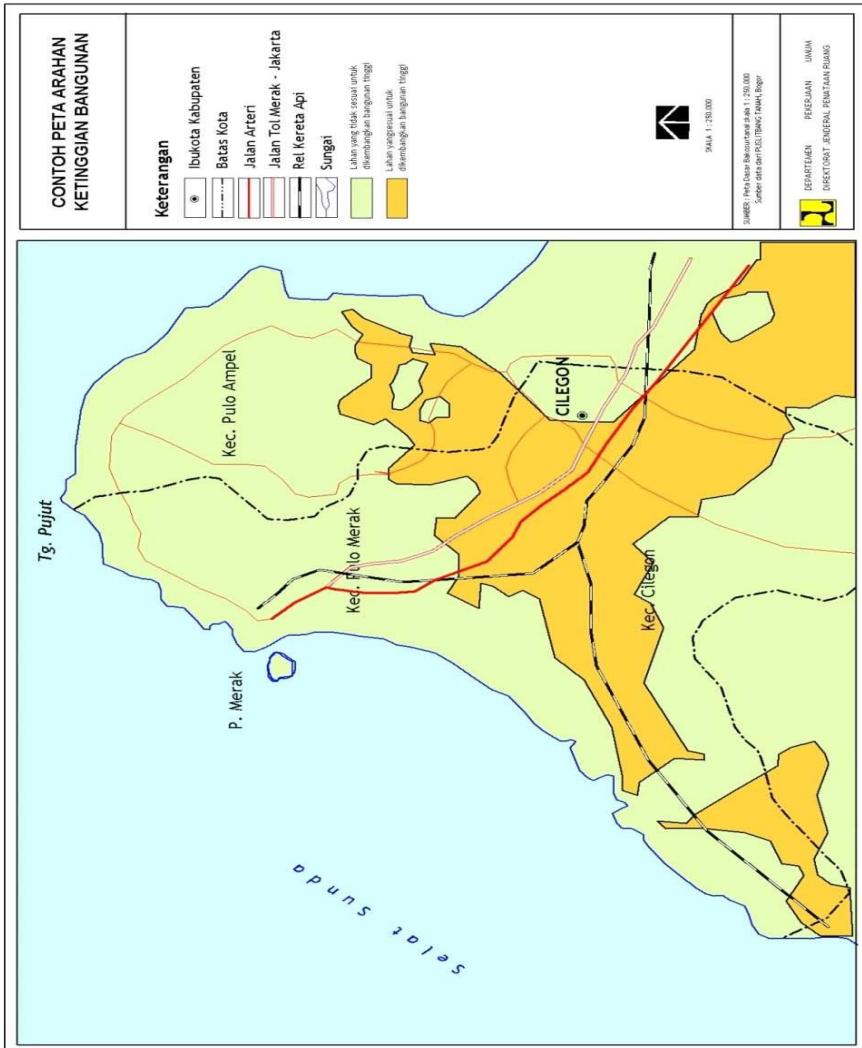
Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk melihat apakah gambaran arahan dan luas wilayah dan atau kawasan perencanaan sesuai dengan arahan rasio tutupan lahan. Berikut contoh peta arahan rasio tutupan.



Gambar 22. Contoh peta arahan rasio tutupan

➤ Arahan ketinggian bangunan

Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk mengetahui daerah yang sesuai untuk dikembangkan bangunan yang tinggi dan perkiraan batasan/persyaratan ketinggian bangunan yang dapat dikembangkan pada daerah yang sesuai ataupun sesuai dengan beberapa persyaratan. Berikut contoh peta arahan ketinggian bangunan.



Gambar 23. Contoh peta arahan ketinggian bangunan

➤ Arahkan pemanfaatan air baku

Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah mengetahui sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada wilayah dan atau kawasan yang akan dikembangkan, memperoleh gambaran kapasitas masing-masing sumber dan yang diarahkan untuk diperlukan perencanaan tata ruang dan memperoleh gambaran prioritas pengembangan sumber air baku sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan dari perencanaan, serta bagaimana teknis penggunaannya.

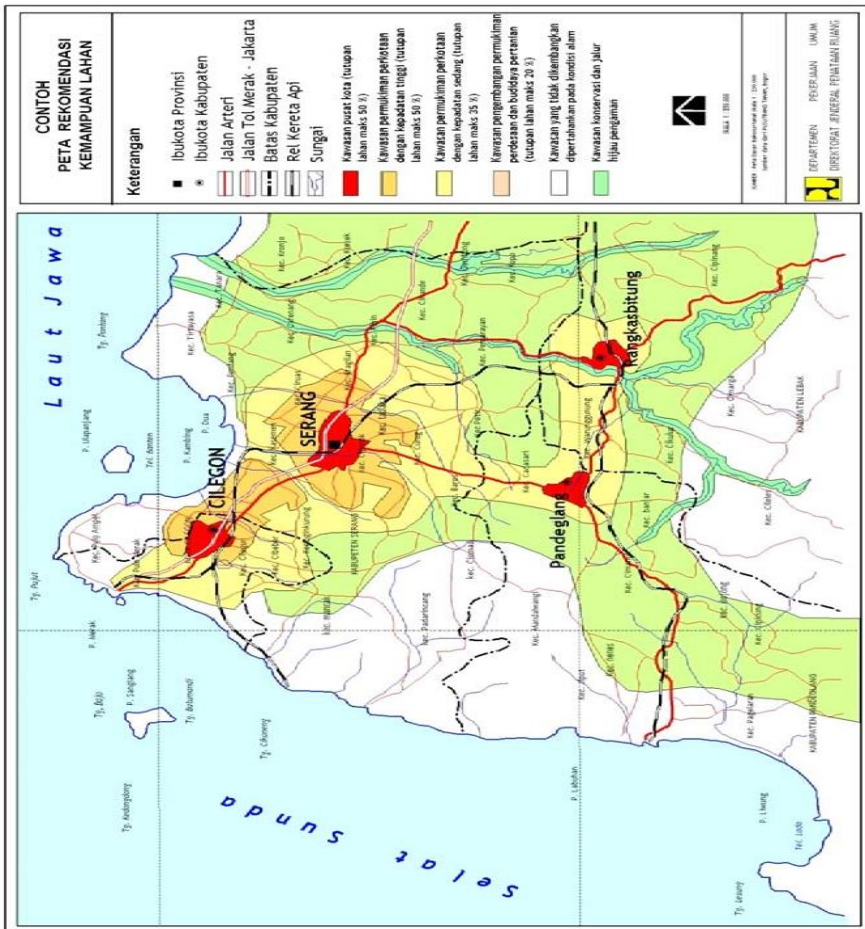
➤ Perkiraan daya tampung lahan

Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana daya tampung lahan di wilayah dan atau kawasan perencanaan, bagaimana distribusi penduduk berdasarkan daya tampungnya dan bagaimana persyaratan pengembangan penduduk untuk wilayah dan atau kawasan yang telah melampaui daya tampungnya.

➤ Rekomendasi kesesuai lahan

Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran umum arah perkembangan wilayah dan atau kawasan yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, mengetahui kapasitas pengembangan kawasan wilayah perencanaan, mengetahui gambaran peruntukan lahan untuk perencanaan tata ruang sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya dan memperoleh persyaratan dan pembatasan pembangunan.

Di bawah ini dapat kita lihat contoh gambar peta rekomendasi kesesuaian lahan:



Gambar 23. Contoh peta rekomendasi kemampuan lahan

b) Aspek Ekonomi

Penilaian ekonomi yang dilakukan pada wilayah dan/atau Kawasan yang akan dikembangkan merupakan untuk mengetahui potensi yang dimiliki dan sektor-sektor yang dapat dipacu untuk peningkatan perekonomian serta permasalahan perekonomian yang dapat menghambat pembangunan. Untuk pengembangan Kawasan agropolitan, aspek ekonomi yang dapat digali adalah penilaian terhadap kemungkinan aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan pada wilayah dan/atau kawasan tersebut berbasis komoditi unggulan dan memiliki daya pengungkit yang besar.

Dalam aktivitas ekonomi, bagaimana pemanfaatan sumber daya yang minimum untuk memperoleh hasil optimum yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana melalui keterkaitan kedepan dan kebelakang dari sektor perekonomian (Choiroh A, Diartho HC, Komariyah S,2020). (Priadi G, Sutandi A, Firdaus M,2018),

➤ Penentuan sektor/komoditas unggulan

Sektor unggulan adalah sektor atau aktivitas ekonomi yang memiliki potensi, kinerja, dan prospek yang lebih unggul dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu untuk menjadi pioneer dalam menggerakkan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis komoditi tersebut.

Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah disekitarnya yang ditunjukkan dengan parameter seperti : a) sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi, b) komoditas yang mempunyai *multiplier effect* yang cukup tinggi, c) komoditas dengan kandungan deposit yang melimpah, dan d) Memiliki potensi *value added* yang cukup baik. (Martauli ED, Gracia S, 2021)

➤ Analisis kelayakan sektor/komoditi unggulan

Sasaran yang diharapkan dari analisis ini adalah melihat potensi kelayakan dari pengembangan sektor/komoditi unggulan antara lain: identifikasi infrastruktur untuk pengembangan dan pemasaran komoditas unggulan, penilaian kelayakan investasi, analisis input output sector/komoditi unggulan, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pengembangan sector/komoditi unggulan.

➤ Aspek sosial budaya

Analisis aspek sosial budaya untuk melihat secara umum social budaya khususnya masyarakat local yang berada di wilayah dan/atau Kawasan perencanaan untuk dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat sekitar, disamping itu untuk mendapat gambaran aspek social budaya yang akan berdampak baik sebelum dan sesudah pengembangan wilayah dan/atau Kawasan. Beberapa analisis yang terkait dengan aspek social budaya adalah a) analisis kependudukan yaitu bagaimana melihat

komposisi penduduk yang terdapat dalam wilayah dan/atau Kawasan khususnya untuk pemanfaatan tenaga kerja, b) analisis pendidikan yaitu bagaimana tingkat pendidikan masyarakat sekitarnya sehingga dapat melihat gambaran tentang sumber daya manusia yang terdapat disekitar kawasan, c) analisis ketenagakerjaan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan dan pengembangan wilayah dan/atau kawasan, d) analisis Kesehatan yaitu bagaimana mendapat gambaran derajat kesehatan di sekitarnya, dan e) analisis permukiman untuk melihat gambaran tentang permukiman dan lingkungan disekitar wilayah dan/atau Kawasan.

Tujuan dari perencanaan wilayah adalah perencanaan penataan ruang wilayah untuk mendorong pembangunan dan pengembangan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan hidup yang lebih baik, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan.

BAB V

KEDUDUKAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS AGROPOLITAN

1. Kawasan Budidaya Pertanian

Kawasan budi daya pertanian yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/kota harus dikelola dengan baik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perencanaan. Di dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan untuk perikanan, kawasan pertambangan, kawasan permukiman, kawasan untuk industri, kawasan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan dan kawasan pertahanan keamanan.

Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melaksanakan budidaya pertanian sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang terdapat dalam Kawasan tersebut. Maksud dan tujuan dari penetapan kawasan budidaya pertanian adalah untuk memudahkan dalam menumbuhkan dan mengembangkan kawasan pertanian

khususnya berbasis agribisnis yang dimulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan yang nantinya akan mendorong peningkatan persediaan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Manfaat penetapan kriteria peruntukan kawasan budidaya pertanian adalah : a) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan, b) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dan pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan, c) memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian, d) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan, e) menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata (Sadesmesli I dkk, 2017). (Permen PU No.41/PRT/M/2007).

Kawasan budidaya pertanian memiliki fungsi antara lain untuk memproduksi bahan pangan, hortikultura, hasil peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan; sebagai daerah resapan air hujan bagi kawasan sekitarnya dan mencegah terjadinya bencana alam; menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat setempat, dan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Kawasan budidaya pertanian merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi serta efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.

Kawasan budidaya pertanian selanjutnya akan ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian dan pembiayaan kawasan pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan UU

No. 7 tahun 1996 tentang Pangan khususnya dalam Pasal 45 yang memberikan ketegasan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 47 ditegaskan bahwa untuk mewujudkan cadangan pangan nasional, pemerintah akan berupaya: a) mengembangkan, membina, dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat. b). mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional. Dengan demikian penetapan kawasan budidaya pertanian diarahkan untuk pengembangan pembangunan pertanian yang berorientasi dan fokus pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas yang optimal.

Sistem budidaya pertanian merupakan sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui upaya manusia dengan menggunakan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya sehingga dapat memproduksi barang/komoditi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian ditetapkan berdasarkan kesesuaian lahan dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. (Zulkarnain, Hartanto N, 2020).

Untuk dapat memperoleh produksi yang optimal, kawasan budidaya pertanian harus memperhatikan karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan yang terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan pertanian tanaman tahunan. Masing-masing karakteristik kawasan peruntukan pertanian tersebut memiliki kriteria teknis seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Karakteristik Kawasan Peruntukan Pertanian

Kriteria Teknis		Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Tanaman Tahunan
Iklim:				
Kelembaban	(%)	33 – 90	29 - 32	42 - 75
Curah Hujan	(mm)	A, B, C (Schmidt & Ferguson, 1951)	350 - 600	1200 - 1600
Sifat Fisik Tanah:				
Drainase		agak baik s/d agak	baik s/d agak	baik s/d agak terhambat

		terhambat	terhambat	
Tekstur:		h, ah, s	h, ah, s	h, ah, s
Bahan Kasar	(%)	< 15	< 15	< 35
Kedalaman Tanah	(cm)	> 30	> 30	> 60
Ketebalan Gambut	(cm)	< 200	< 200	< 200
Kematangan Gambut		saprik, hemik	saprik, hemik	saprik, hemik
Retensi Hara:				
Kejenuhan Basa	(%)	> 30	> 30	> 30
Kemasaman Tanah (pH)		5,5 - 8,2	5,6 - 7,6	5,2 - 7,5
Kapasitas Tukar Kation	(Cmo l)	> 12	> 12	> 12
Kandungan C-Organik	(%)	> 0,8	> 0,8	> 0,8
Toksistas:				
Kedalaman Bahan Sulfidik	(cm)	> 50	> 50	> 50
Salinitas	(dS/m)	< 4	< 4	< 4
Bahaya Erosi:				
Lereng	(%)	< 8	< 15	< 40
Tingkat Bahaya Erosi		R	sd	Sd
Bahaya Banjir:				
Genangan		F0, F11, F12, F21, F23	F0, F11, F12, F21, F23	F0, F11, F12, F21, F23
Penyiapan Lahan:				
Batuan di Permukaan	(%)	< atau = 25	< atau = 25	< atau = 25
Singkapan Batuan	(%)	< atau = 25	< atau = 25	< atau = 25

Sumber: Puslitbang Tanah, Departemen Pertanian.

1) Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

Kawasan budidaya tanaman pangan di Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi yang sangat besar, khususnya

dukungan sumber daya alam. Akan tetapi saat ini dengan adanya beberapa pergeseran atau alih fungsi lahan menyebabkan lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman ataupun peruntukan lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan perencanaan untuk mencetak lahan budidaya yang baru di beberapa Kawasan yang masih terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara optimal. Adapun yang menjadi kriteria untuk Kawasan budidaya pertanian khususnya pertanian tanaman pangan, adalah lokasi Kawasan tersebut mengacu pada RTRW provinsi serta kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan untuk jenis komoditi tanaman pangan baik pada pertanian lahan basah maupun pertanian lahan kering, (Khairad F, Noer M, Refdinal M, 2020),

2) Kawasan Budidaya Hortikultura

Kriteria yang dijadikan dasar dalam menetapkan kawasan budidaya tanaman hortikultura adalah: a) Mempunyai kesesuaian lahan budidaya tanaman hortikultura serta didukung oleh sarana dan prasarana untuk proses budidaya, panen dan pasca panen, b) Kawasan tersebut memiliki potensi dan daya dukung untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis tanaman hortikultura, dan c) memiliki akses dan prasarana transportasi dan pengangkutan yang mudah, dekat serta lancar dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi. Hal ini sangat diperlukan dalam mendukung proses budidaya, pengolahan panen dan pasca panen serta proses distribusi produk sehingga hasil produksi tanaman hortikultura dapat sampai ke konsumen dalam keadaan masih segar.

Tanaman hortikultura merupakan produk yang umumnya berat, tidak tahan lama, mudah rusak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk proses penyimpanan sehingga membutuhkan proses penanganan dan distribusi yang cepat, baik dan tepat.

3) Kawasan Budidaya Perkebunan

Beberapa kriteria untuk kawasan budidaya perkebunan adalah a) lokasi Kawasan mengacu pada RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan mengacu pada kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman perkebunan baik pada pertanian lahan basah maupun pertanian lahan kering, b) untuk pengembangan Kawasan perkebunan pada lahan gambut mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan presiden, instruksi presiden maupun peraturan Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan mengurangi dampak negative yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan lahan gambut dan untuk menjaga ekosistem gambut tersebut, c) kawasan dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta/ pengusaha dan/atau masyarakat sesuai dengan biofisik, sosial ekonomi dan lingkungan untuk tanaman perkebunan, d) Kawasan budidaya perkebunan berbasis pada komoditas perkebunan nasional dan daerah dan/atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan, e) Kawasan budidaya perkebunan merupakan Kawasan yang dikembangkan oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok usaha atau koperasi atau petani perorangan, f) kawasan budidaya perkebunan dapat diintegrasikan dengan pengembangan jenis komoditas budidaya lainnya sehingga dapat memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar dalam pengelolaan Kawasan ini.

4) Kawasan Budidaya Peternakan

Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus disediakan dan disiapkan untuk kegiatan budidaya ternak atau dilakukan secara terintegrasi dengan budidaya subsektor lainnya sebagai komponen usahatani. Umumnya Kawasan budidaya peternakan ini berbasis pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan yang memiliki orientasi usaha peningkatan perekonomian dan merupakan satu kesatuan usaha yang dimulai dari industri hulu sampai dengan industri hilir.

Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai khususnya pada daerah kabupaten/kota, Hal ini disebabkan karena terjadinya kompetisi penggunaan lahan yang semakin tinggi, terjadinya alih fungsi lahan, dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas yang menyebabkan sulitnya pengembangan Kawasan budidaya peternakan ini. Untuk pengembangan Kawasan budidaya peternakan memerlukan lahan yang luas dan didukung oleh penyediaan bahan pakan untuk ternak baik itu berupa rumput, padang penggembalaan ataupun pakan yang berasal dari limbah hasil budidaya tanaman pangan dan hortikultura, dan budidaya perkebunan.

Untuk mengembangkan Kawasan budidaya pertanian, tahapan yang dilakukan untuk memanfaatkan Kawasan budidaya pertanian adalah dengan menyusun rancang bangun kawasan budidaya pertanian berdasarkan pada kriteria baku maupun spesifikasi teknis, Rancang bangun kawasan budidaya pertanian merupakan upaya penataan wilayah pengembangan pertanian di dalam wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil identifikasi terhadap potensi dan kondisi wilayah kabupaten/kota tersebut. (Cipta SW, Sitorus SRP, Lubis DP, 2017),

Rancang Bangun kawasan budidaya pertanian diarahkan pada sentra – sentra produksi pertanian yang merupakan komoditi unggulan baik pada wilayah dan/atau kawasan yang telah ada maupun pengembangan wilayah dan/atau Kawasan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut.

2. Kawasan Pertanian Berbasis Agropolitan

Tantangan pembangunan nasional saat ini antara lain bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi stabil dan berkelanjutan, mempercepat pemerataan dan keadilan pembangunan di berbagai sektor di daerah, serta bagaimana menjamin keberlanjutan pembangunan dalam rangka, memperkuat sendi perekonomian bangsa melalui perluasan perekonomian di daerah termasuk di dalamnya di pedesaan.

Pembangunan dan pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung ekonomi wilayah di Indonesia. Di sisi lain di wilayah pedesaan yang mata pencarian utama penduduknya sebagai petani masih dihadapkan pada isu belum berkembangnya pola budidaya pertanian yang menyebabkan masih rendahnya produktivitas petani dan usaha skala mikro yang terdapat di pedesaan juga belum berkembang dengan baik.

Pengembangan kawasan budidaya pertanian merupakan hal yang memiliki potensi yang besar. Melihat dari keberhasilan dan proses kinerja pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan pada daerah-daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Pada daerah tersebut pembangunan pertanian dilakukan dengan menjalankan sistem dan usaha agribisnis di dalam kawasan maupun melakukan kerjasama dengan kawasan lainnya dalam

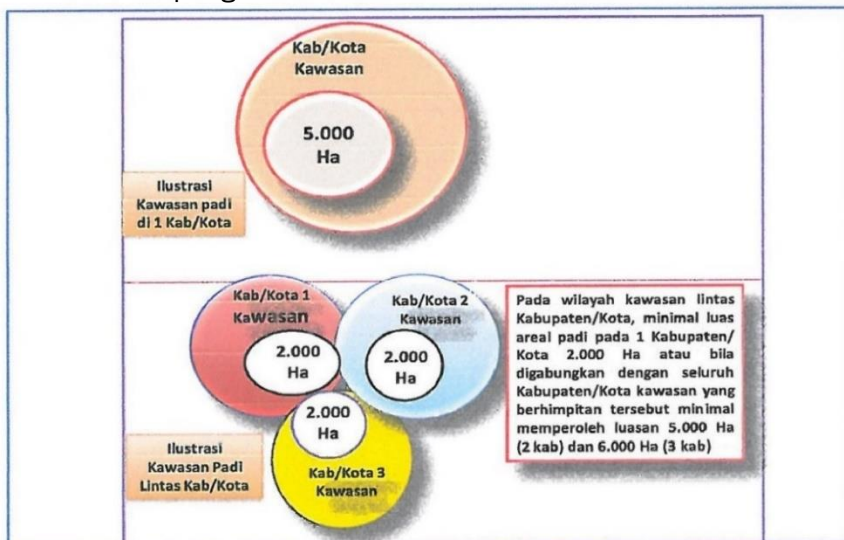
rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional dan daerah. Mencontoh dari keberhasilan tersebut, diperlukan arahan dan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melalui pedoman pengembangan kawasan budidaya pertanian.

Pedoman pengembangan kawasan budidaya pertanian disusun dengan tujuan: a) sebagai panduan bagi para perencana dan konsultan di pusat dan daerah dalam menyusun dan melakukan review terhadap *masterplan* dan *action plan* serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan dan melakukan analisis terhadap kinerja hasil implementasi rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian termasuk di dalamnya yang menjadi komoditi prioritas nasional dan daerah, b) sebagai panduan bagi pimpinan unit kerja yang melakukan perencanaan dalam meningkatkan kapasitas perencana dan perencanaan dalam pengembangan kawasan budidaya pertanian termasuk komoditi prioritas nasional dan daerah yang berbasis pada kinerja dan berpedoman pada perencanaan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berdimensi kewilayahan, c) sebagai panduan bagi para penentu kebijakan di pusat dan daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pelaksanaan untuk pengembangan komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah secara komprehensif dan terpadu, yang dimulai dari pengembangan aspek hulu, *on farm*, hilir dan aspek penunjang lainnya dalam rangka mewujudkan rangkaian proses agribisnis dalam suatu konsep kawasan agropolitan dan, d) sebagai panduan bagi aparat teknis di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan kawasan budidaya pertanian.

Dengan ditetapkannya pedoman pengembangan kawasan budidaya pertanian, maka diharapkan dapat tercapai sasaran yang meliputi: a) tersedianya instrumen pedoman penyusunan *masterplan* dan *action plan* pembangunan pertanian yang berbasis kewilayahan dan sejalan RTRW Provinsi dan kabupaten kota, b) terumuskannya instrumen pendukung implementasi kebijakan perencanaan wilayah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan kawasan budidaya pertanian, c) terumuskannya bahan koordinasi antar stakeholder dalam pemerintahan dalam menentukan komoditas unggulan daerah, meningkatkan daya saing wilayah dan komoditas prioritas nasional dan daerah.

Untuk optimalisasi manajemen pembangunan pertanian, kawasan budidaya pertanian dibagi menurut kelompok yang mencerminkan basis komoditas utama yang dikembangkan pada wilayah dan atau kawasan yaitu: a) kawasan budidaya tanaman pangan, b) kawasan budidaya hortikultura, c) kawasan budidaya perkebunan dan d) kawasan budidaya peternakan.

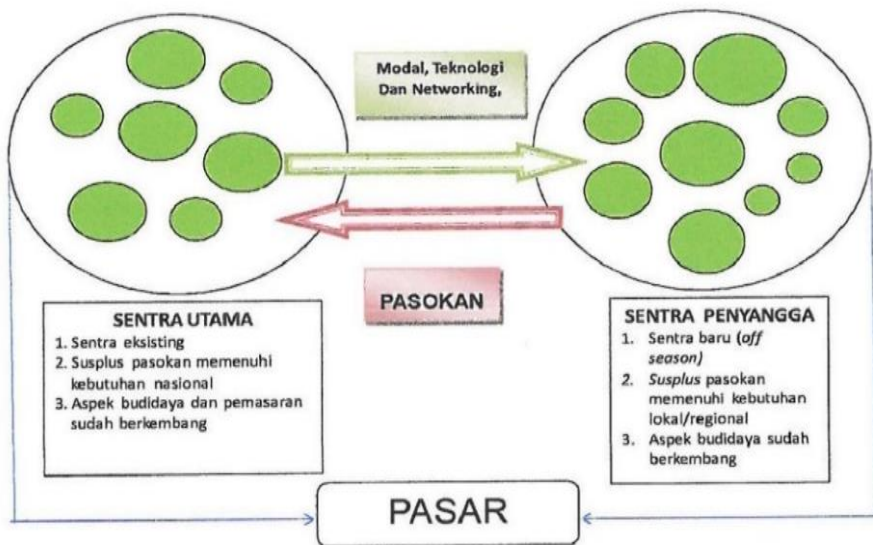
Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan yang disatukan oleh adanya kesesuaian faktor lingkungan sebagai faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan, serta didukung oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah ada dan telah melakukan kegiatan budidaya atau calon lokasi baru yang berupa satu hamparan atau hamparan parsial yang terhubung dengan aksesibilitas jaringan infrastruktur dari kelembagaan secara memadai. Berikut gambar ilustrasi kawasan tanaman pangan.



Gambar 24. Ilustrasi Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan budidaya hortikultura merupakan daerah sebaran usaha budidaya hortikultura yang disatukan oleh kesamaan lingkungan yang menjadi faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha budidaya hortikultura, tanaman hortikultura

merupakan jenis tanaman yang umumnya merupakan tanaman dengan jangka waktu tanam yang singkat, sehingga dalam penentuan kawasan budidaya perlu diketahui pula jenis komoditi yang cocok dan sesuai dengan klimatologi wilayah dan atau kawasan dan bagaimana rotasi tanam dari masing-masing komoditi yang dibudidayakan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Berikut ilustrasi kawasan budidaya hortikultural.

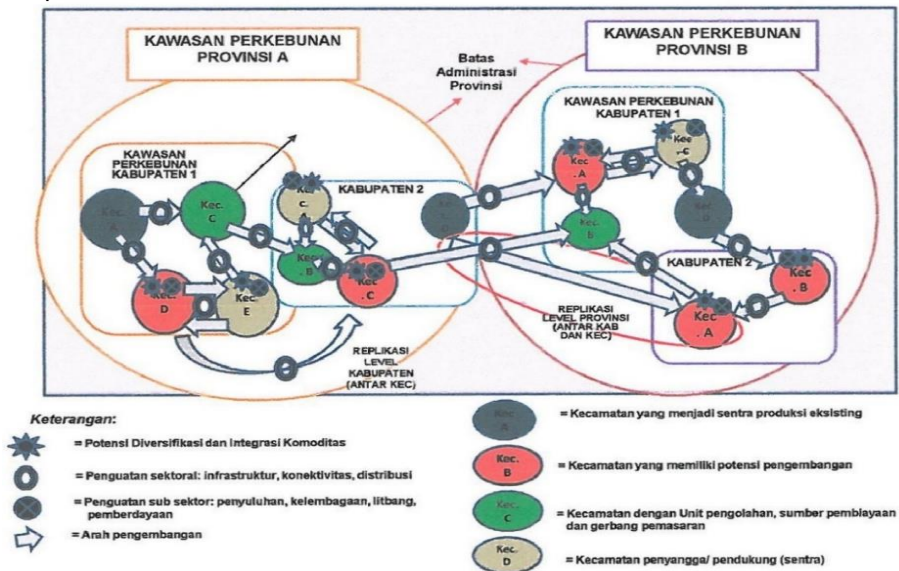


Gambar 25. Ilustrasi kawasan hortikultural

Kawasan budidaya perkebunan merupakan daerah sebaran usaha budidaya perkebunan yang disatukan oleh kesamaan lingkungan yang menjadi faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha budidaya perkebunan.

Pada kawasan budidaya perkebunan terdapat beberapa kriteria khusus yang bersifat sebagai spesifik komoditas. Tanaman perkebunan dibedakan atas tanaman tahunan, tanaman semusim, serta tanaman rempah dan penyegar. Kawasan budidaya perkebunan yang menjadi ciri dan mencakup aspek-aspek teknis adalah: a) pengusahaan terhadap kawasan budidaya perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi/skala usaha, b) pengusahaan terhadap kawasan budidaya perkebunan besar, dilakukan dengan cara kerjasama

perkebunan besar, dilakukan dengan cara kerjasama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan. Kerjasama, kemitraan ini dapat menggunakan beberapa pola seperti pola perusahaan inti-plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat perusahaan mitra, kerja sama pengolahan hasil dan atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya, c) pengembangan usaha dalam kawasan budidaya perkebunan ini diarahkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Berikut ilustrasi kawasan perkebunan.

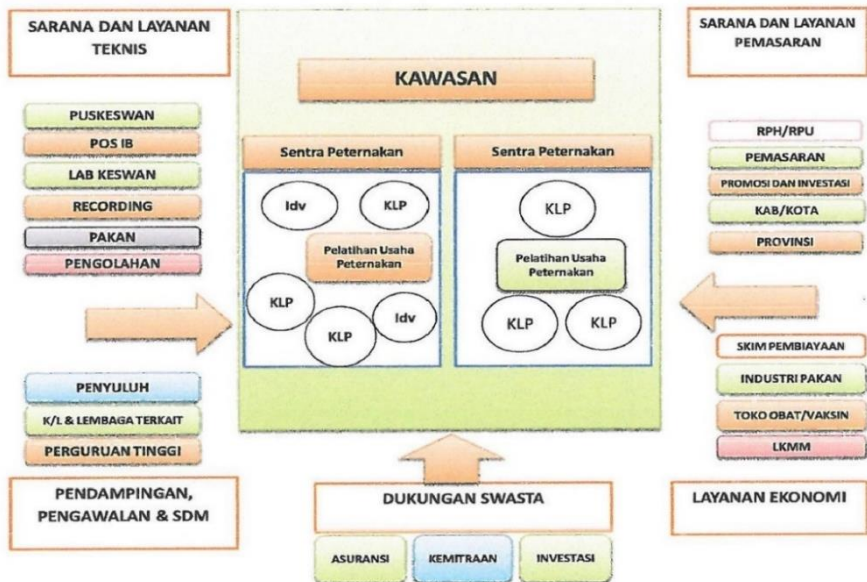


Gambar 26. Ilustrasi Kawasan Budidaya Perkebunan

Kawasan budidaya peternakan merupakan kawasan yang merupakan gabungan sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dengan manajemen usaha peternakan, kawasan budidaya peternakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengembangan ternak secara memadai dan sesuai dengan standar budidaya ternak.

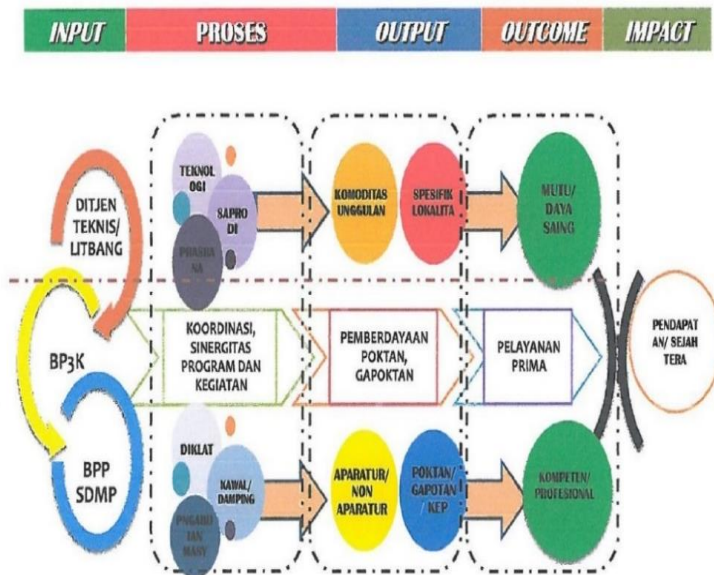
Kawasan budidaya peternakan harus didukung oleh ketersediaan lahan sebagai lokasi padang pengembangan dan atau lahan untuk budidaya hijauan pakan ternak untuk pemenuhan pakan bagi ternak. Pengembangan kawasan budidaya peternakan dapat dilakukan melalui integritas dengan komoditi lainnya seperti pola integrasi ternak dengan tanaman perkebunan, integrasi ternak dengan tanaman pangan dan atau integrasi

ternak dengan tanaman hortikultura. Di samping itu kawasan budidaya peternakan memerlukan pula sarana prasarana dan layanan pemasaran yang saling terintegrasi lokasi kawasan peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Ilustrasi terkait kawasan budidaya peternakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 27. Ilustrasi Kawasan Budidaya Peternakan

Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pengembangan kawasan dengan menggunakan pendekatan politik teknokratis, keterpaduan antara *top down policy* - *bottom up planning* serta mengikutsertakan partisipasi masyarakat dengan menghasilkan dokumen perencanaan pengembangan kawasan budidaya pertanian melalui dokumen *masterplan* dan *action plan* pengembangan kawasan pertanian termasuk kawasan agropolitan. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi acuan teknis sesuai dengan kondisi agroekosistem dan sosial budaya serta ekonomi yang melibatkan peran stakeholder dalam penguatan kelembagaan pengembangan kawasan budidaya pertanian. Berikut gambar skema simulasi.



Gambar 28. Skema Simulasinya.

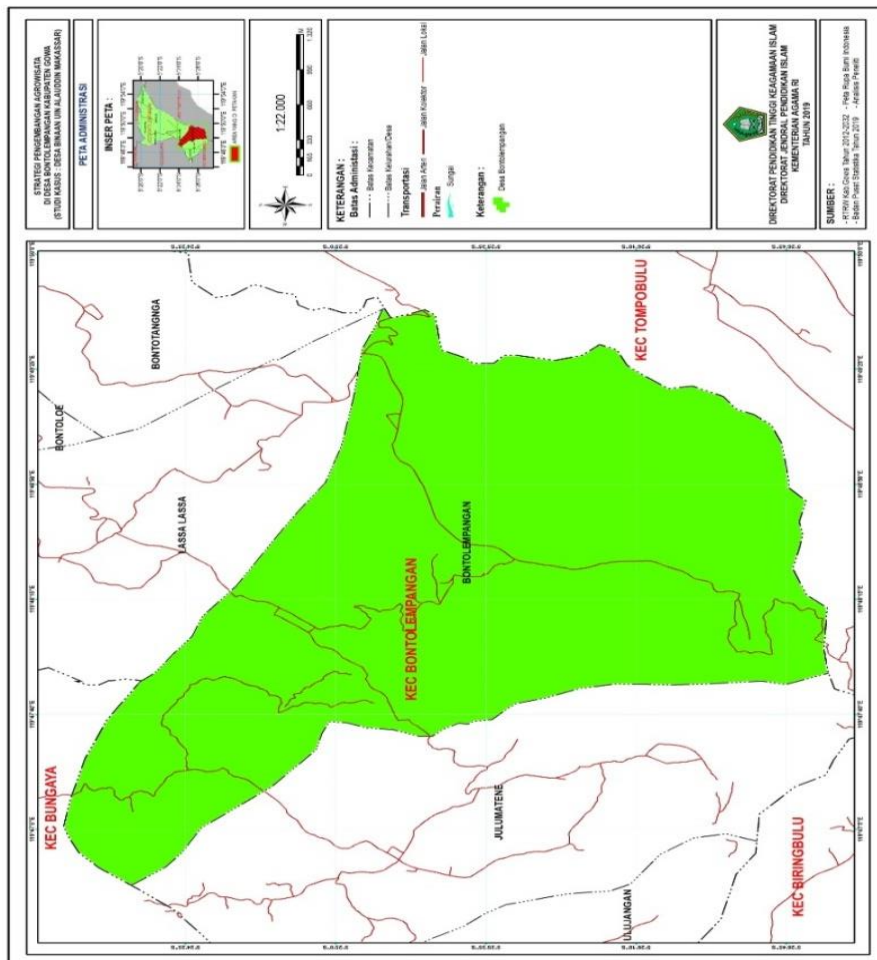
3. Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Daerah

Studi Kasus I

Judul strategi pengembangan Agrowisata di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa. (Anshar M. 2019). Rumusan masalah: bagaimana potensi sektor pertanian Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa dan strategi pengembangan wilayah dalam mendukung pengembangan agrowisata di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa.

a) Potensi Sektor Pertanian Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa.

Penelitian tentang strategi pengembangan agrowisata ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yaitu di Desa Bontolempangan. Penetapan lokasi penelitian didasarkan bahwa desa Bontolempangan kaya akan potensi dalam pengembangan pertanian dan pariwisata.

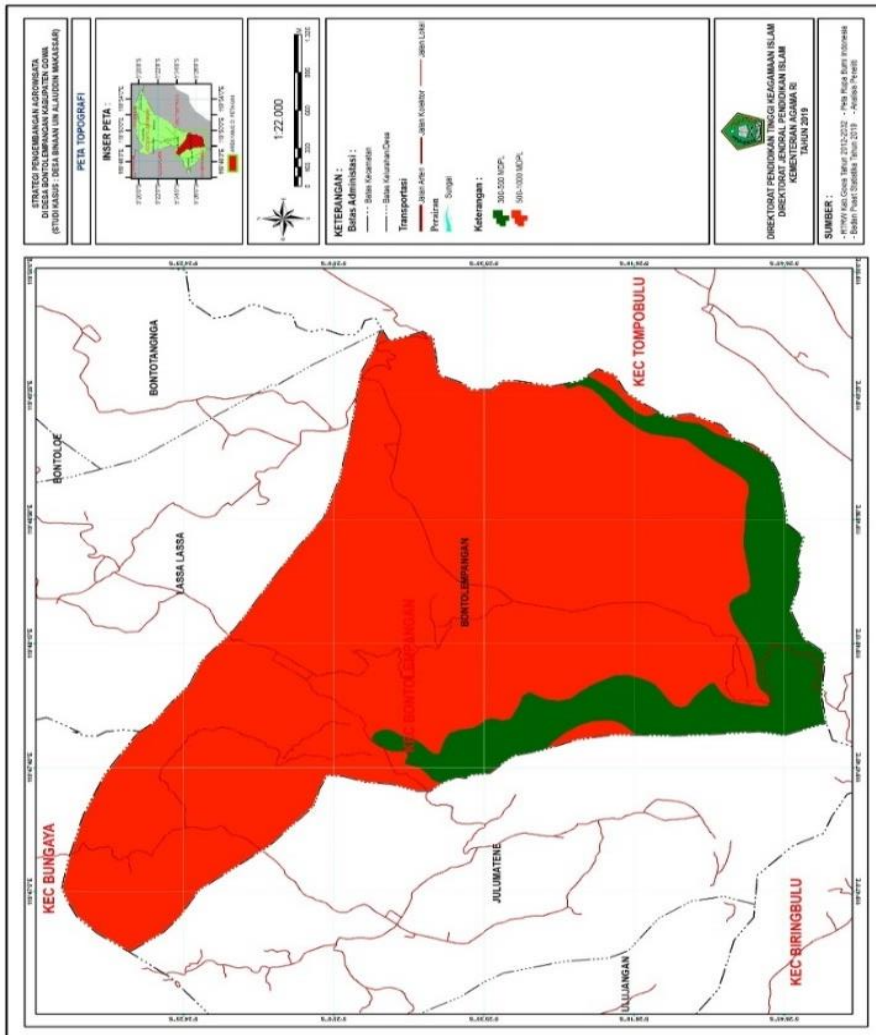


Gambar 29. Peta Administrasi Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa

Gambar di atas adalah merupakan peta administrasi Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dimana desa ini adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. Desa Bontolempangan memiliki luas wilayah 22.16 Km² yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun. Batas wilayah administrasinya disebelah Utara berbatasan dengan Desa Lassa-Lassa, Sebelah Timur Kecamatan Tompobulu, Sebelah Selatan Kecamatan Biringbulu dan Sebelah Utara berbaasan dengan Desa Julumatene. Dengan karakteristik wilayah sebagai berikut.

1) Topografi

Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa memiliki Wilayah sebagian besar merupakan dataran tinggi dan juga sebagai daerah imbuhan air tanah dengan topografi berkisar 300 -1000 Mdpl dan berada pada kemiringan lereng 0-40 %. Berikut peta Topografi Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

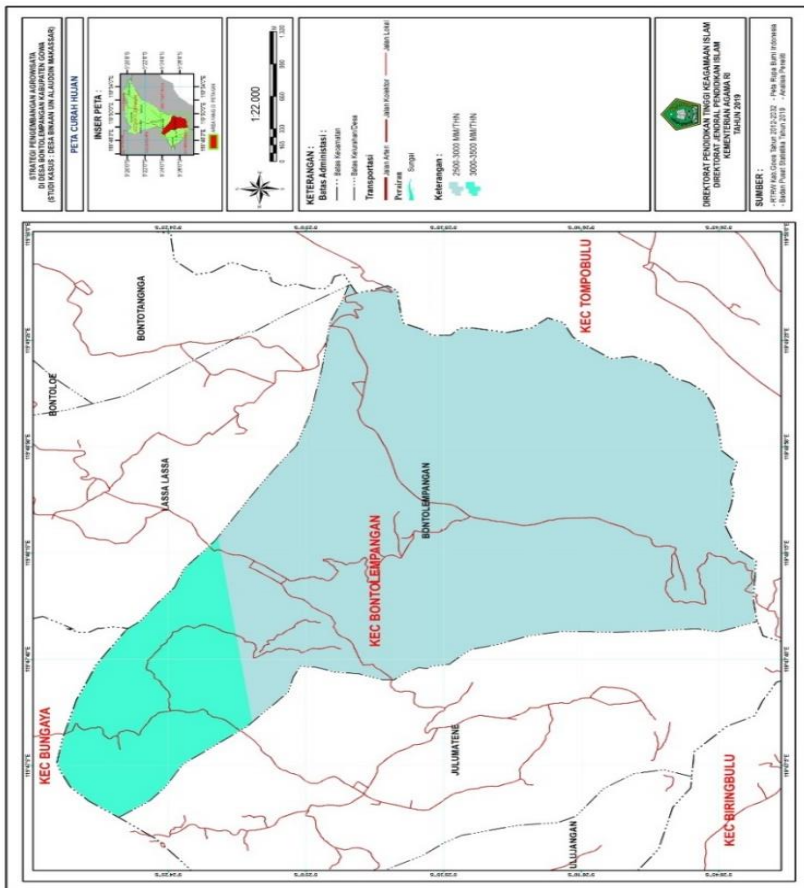


Gambar 30. Topografi Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa

Desa Bontolempangan merupakan Desa Terluas ketiga di kec. Bontolempangan dengan jumlah penduduk sebesar 2.018 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Bontolempangan sebagai petani dengan luas area persawahan sebesar 189 Ha, area perkebunan sebesar 518 Ha dengan pembagian wilayah berdasarkan topografinya 300–500 MDPL dan 500–1.000 Meter Di atas Permukaan Laut

2) Curah Hujan

Curah hujan merupakan intensitas hujan yang turun disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Kondisi klimatologi secara umum di Kabupaten Gowa. Berikut peta Curah Hujan Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

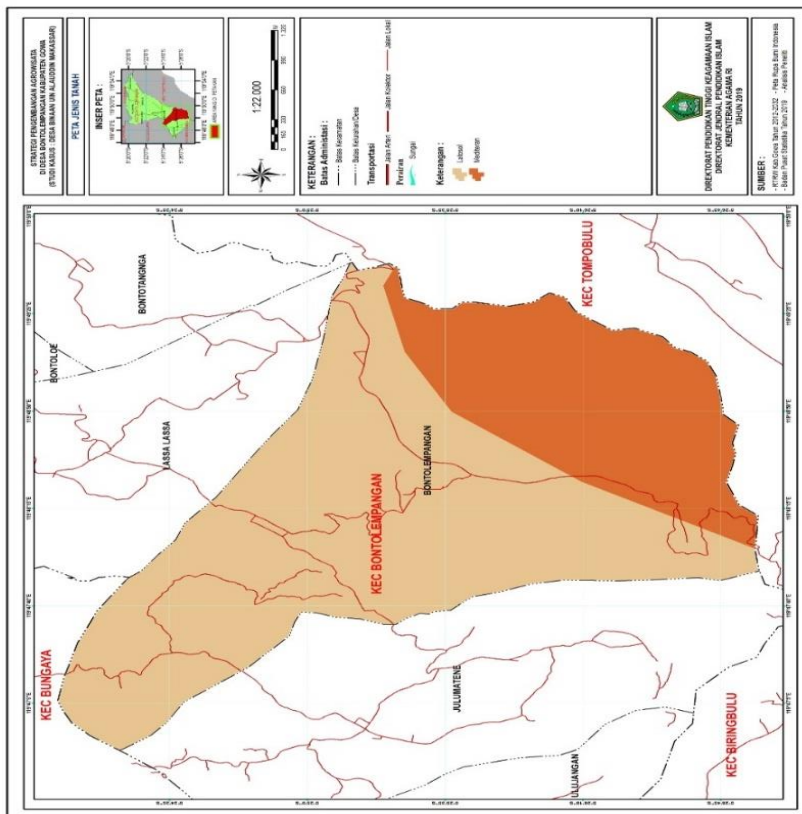


Gambar 31. Curah Hujan Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa

Untuk di Desa Bontolempangan curah hujan mencapai 2500-3500 mm per-tahun dan hal ini sangat memungkinkan untuk mengusahakan komoditi unggulan.

3) Jenis Tanah

Tanah merupakan salah satu material yang tersusun dari mineral dan bahan organik dan berasal dari pelapukan bahan organik serta berisi zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang pada partikel padat. Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dimana dari tanah ini tumbuh tanaman-tanaman yang ditopang oleh air dan unsur hara yang terdapat dalam tanah. Desa Bontolempangan dengan luas wilayah 22.16 km² memiliki area persawahan sebesar 189 ha, dan area perkebunan sebesar 518 ha. Berikut peta jenis tanah Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

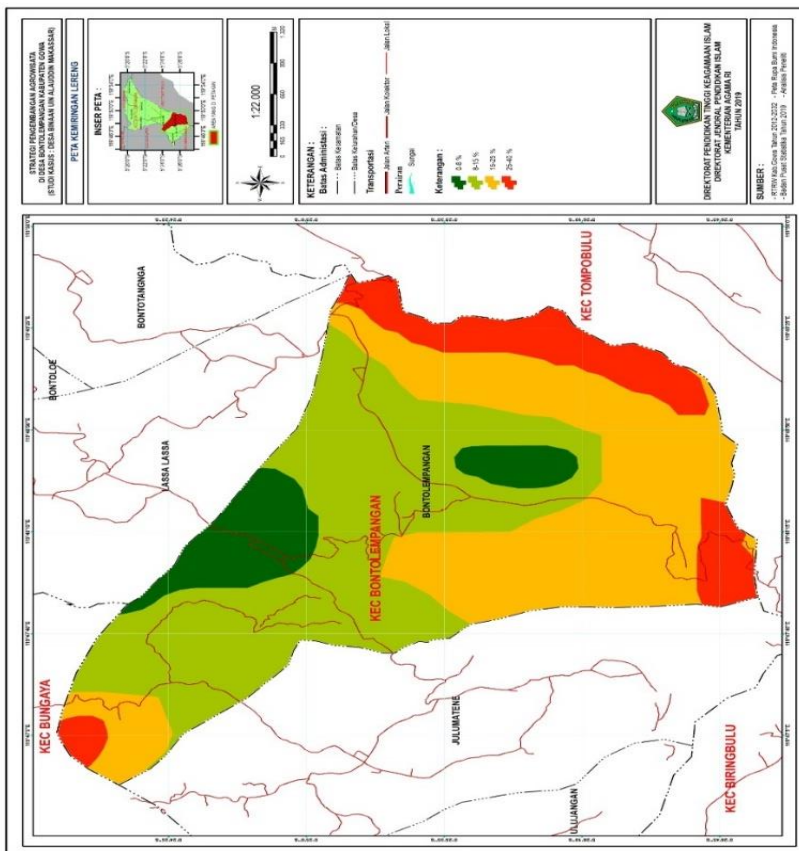


Gambar 32. Jenis Tanah Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa

Jenis batuan yang ada di Desa Bontolempangan yaitu batuan gunung api batuape cindako, batuan gunung api lombobattang endapan alluvium dan pantai dan formasi camba yang cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

5) Kemiringan Lereng

Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa memiliki batas wilayah di Utara Desa Lassa-Lassa, di Timur Kecamatan Toppobulu, di Selatan Kecamatan Biringbulu dan di Utara berbatasan dengan Desa Julumatene. Dengan luas wilayah 22.16 km² yang memiliki kondisi kemiringan yang berbeda-beda. Berikut peta kemiringan lereng Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 34. Kemiringan Lereng Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa

Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa memiliki wilayah dengan tingkat kemiringan masing-masing 0-8%, 8-15%, 15-25% dan 25-40%. Berikut potensi sektor pertanian dan perkebunan di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa.

➤ Analisis *Location Quotients* (LQ)

Kawasan agrowisata merupakan salah satu metode pendekatan pembangunan pengembangan kawasan dengan menempatkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sentra pengembangan. Dengan dukungan alam yang penataan kawasan yang baik, akan memberikan daya dukung dalam pengembangan potensi wisata. Pengembangan kawasan agrowisata secara professional, terpadu dan berkelanjutan, dapat mendorong budidaya pertanian yang dilakukan dijadikan sebagai media penyaluran informasi pengetahuan budidaya tanaman, teknologi yang digunakan dan sumber daya alam yang ada dan dikelola. Hal ini akan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi dan pariwisata.

Pengembangan kawasan di Kabupaten Gowa termasuk kawasan agrowisata di Desa Bontolempangan, diperkuat dengan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa tahun 2012-2023.

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk melihat dan mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis di suatu daerah dan menjadi dasar untuk penentuan sektor yang akan dikembangkan. Untuk melakukan identifikasi sektor basis dan non basis di Desa Bontolempangan maka dilakukan analisis *Location Quotients* (LQ) dengan menggunakan data produksi (ton).

Adapun hasil analisis *Location Quotient* (LQ) tanaman perkebunan dan persawahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Analisis *Location Quotient* Tanaman Perkebunan dan Persawahan menurut Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2014-2018.

Komoditas	<i>Location Quotient</i> (LQ)					Rata-rata	Ket
	2014	2015	2016	2017	2018		
Padi Sawah	0.03	0.28	0.23	0.00	0.50	0.21	non basis

Padi Ladang	0.10	121.37	166.57	0.00	-	57.61	Basis
Jagung	0.06	0.29	0.27	0.51	0.74	0.37	non basis
Kacang Tanah	2.09	0.23	313.74	0.07	-	63.23	Basis
Ubi Kayu	0.10	0.42	0.42	0.25	0.49	0.34	non basis
Ubi Jalar	12.96	100.99	73.39	1114.77	435.5	347.52	Basis
Kelapa Hibrida	3.47	0.08	0.05	0.10	0.10	0.76	non basis
Kelapa Dalam	3.25	0.11	0.06	0.09	0.12	0.73	non basis
Kopi Robusta	5.52	0.31	0.15	1.05	1.35	1.68	Basis
Kopi Arabika	45.47	0.21	0.09	0.34	0.44	9.31	Basis
Cokelat	42.67	1024.08	452.95	0.05	0.81	304.11	Basis
Cengkeh	15.15	0.50	0.21	0.63	0.85	3.47	Basis
Jambu Mente	30.19	0.51	0.23	0.00	-	6.19	Basis
Kemiri	20.52	0.43	0.17	0.01	0.08	4.24	Basis
Kapuk	4.71	0.20	0.05	0.06	0.19	1.04	Basis
Vanili	0.00	0.31	0.04	0.08	0.03	0.09	non basis

Sumber: Data yang diolah 2019

Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa jika nilai LQ yang diperoleh <1 maka tanaman tersebut merupakan non basis dan apabila diperoleh nilai >1 maka tanaman tersebut dapat menjadi basis. Berdasarkan analisis LQ (*Location Quotient*) pada tanaman perkebunan dan persawahan menurut Kecamatan dan Kabupaten tahun 2014-2018, maka diperoleh hasil pada tahun 2014 komoditas yang memperoleh nilai >1 (basis) yaitu kacang tanah, ubi jalar, kelapa hibrida, kelapa dalam, kopi robusta, kopi arabika, cokelat, cengkeh, jambu mente, kemiri dan kapuk. Pada tahun 2015 komoditas yang memperoleh nilai >1 (basis) yaitu padi ladang, ubi jalar dan cokelat. Pada tahun 2016 komoditas yang memperoleh nilai >1 (basis) yaitu padi ladang, kacang tanah, ubi jalar dan cokelat. Pada tahun 2017 komoditas yang memperoleh nilai >1 (basis) yaitu ubi jalar dan kopi robusta. Pada tahun 2018 komoditas yang memperoleh nilai >1 (basis) yaitu ubi jalar dan

kopi robusta. Dari hasil *Location Quotient* di atas komoditas yang setiap tahunnya merupakan sektor basis adalah ubi jalar.

➤ Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk mengetahui sektor unggulan yang potensial untuk mendukung proses pembangunan dalam suatu wilayah, dengan melihat perubahan perekonomian lokal di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Pada analisis ini mengakomodasi besarnya PDRB dari nilai produksi suatu sektor dari waktu ke waktu. Nilai analisis DLQ komoditas perkebunan di Kecamatan Bontolempangan dan Kabupaten Gowa tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Analisis DLQ tahun 2014-2018

No.	Komoditas Perkebunan	Kecamatan Bontolempangan							Kabupaten Gowa						
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	DLQ	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	DLQ
1	Padi Sawah	5.00	13.68	17.50	25.74	19.73	16.33	0.35	335.15	352.89	380.46	0.00	401.98	294.10	631.25
2	Padi Ladang	3.00	453.00	952.00	0.00	0.00	281.60	0.23	56.11	27.24	28.75	27.28	0.00	27.87	352.21
3	Jagung	7.80	9.31	12.94	15.21	18.93	12.84	0.51	227.22	234.76	241.78	239.63	262.30	241.14	523.31
4	Kacang Tanah	1.60	26.00	63.00	6.00	0.00	19.32	0.15	1.45	814.00	1.01	686.00	937.00	487.89	297.54
5	Ubi Kayu	13.00	14.07	18.92	10.17	10.67	13.36	0.81	254.42	246.07	225.43	320.63	223.96	254.10	550.51
6	Ubi Jalar	77.00	77.00	74.00	563.00	357.00	229.60	4.50	11.22	5.56	5.07	4.05	8.41	6.87	307.32
7	Kelapa Hibrida	2.10	2.09	2.05	2.12	1.72	2.02	0.18	1.14	195.59	206.46	170.71	171.00	148.98	297.24
8	Kelapa Dalam	16.89	20.87	16.86	14.00	13.78	16.48	1.03	9.82	1402.01	1520.96	1203.17	1203.00	1067.79	305.91
9	Kopi Robusta	25.64	19.06	14.49	46.25	46.25	30.34	1.54	8.77	453.90	496.82	352.28	352.00	332.75	304.86
10	Kopi Arabika	67.07	60.36	41.58	73.70	73.70	63.28	3.93	2.79	2119.79	2328.11	1730.71	1731.00	1582.48	298.88
11	Cokelat	256.75	294.57	192.53	7.88	106.42	171.63	14.87	11.37	2.10	2.14	1342.00	1342.00	539.92	307.46
12	Cengkeh	11.68	12.94	8.57	11.50	11.50	11.24	0.73	1.46	188.08	201.61	147.63	138.47	135.45	297.55
13	Jambu Mente	107.65	89.77	66.74	0.00	3.15	53.46	6.27	6.74	1276.73	1475.87	0.00	0.00	551.87	302.83
14	Kemiri	29.14	20.10	10.96	1.30	1.30	12.56	1.74	2.68	339.70	317.22	1099.50	164.00	384.62	298.78
15	Kapuk	6.24	3.54	1.58	1.30	1.30	2.79	0.42	2.51	130.91	162.08	164.47	70.00	105.99	298.60
16	Vanili	0.17	0.23	0.06	0.02	0.02	0.10	0.07	408.00	5.50	7.58	2.00	6.00	85.82	704.10

Sumber: Hasil Analisis 2019

Hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa nilai DLQ >1 maka potensi perkembangan sektor daerah tersebut lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama dalam skala yang lebih

luas seperti Provinsi dan Nasional secara keseluruhan demikian pula sebaliknya apabila nilai analisis DLQ <1 maka perkembangan sektor tersebut lebih rendah dibandingkan pada skala nasional. Dari hasil analisis DLQ yang telah dilakukan, maka di Kecamatan Bontolempangan komoditas yang memperoleh nilai DLQ >1 yaitu pada komoditas ubi jalar, kelapa dalam, kopi robusta, kopi arabika, jambu mente dan kemiri.

b) Strategi Pengembangan Wilayah dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Agrowisata di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa.

Untuk melakukan suatu pengembangan wilayah dalam mendukung pengembangan agrowisata maka perlu disusun sebuah strategi sebagai penopang pertumbuhan suatu wilayah. Untuk mengetahui strategi apa yang harus kita lakukan perlu diketahui bagaimana besar aktivitas sektor pertanian yang ada pada suatu wilayah. Sehingga untuk mengetahui strategi yang akan disusun nantinya maka perlu dilakukan analisis *shift share* (SS) dan analisis gabungan antara *shift share* (SS) dan *location quotient* (LQ). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu wilayah yang lebih luas. Analisis ini juga dapat mengetahui perkembangan besar aktivitas suatu sektor pada wilayah sehingga dapat mengetahui strategi yang akan dilakukan dapat dilihat dari hasil perhitungan atau perkembangan dari masing-masing sub-sektor.

1) *Shift Share Analysis* (SSA)

Shift Share Analysis (SSA) merupakan alat analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana pergeseran peran dari suatu komoditi terhadap total komoditi yang terdapat dalam suatu daerah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat kinerja dari suatu sektor di daerah tersebut dibandingkan dengan lingkup yang lebih besar seperti provinsi atau nasional.

Hasil analisis SSA komoditi perkebunan di kecamatan Bontolempangan di Kabupaten Gowa pada tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Analisis SSA Tahun 2014-2015

No.	Komoditas	Kecamatan Bontolempang		Kabupaten Gowa		ri	Ri	Ra
		2014	2019	2014	2018			
		yo	yt	Yo	Yt	yit/yio	Yit/Yio	Yt/Yo
1	Padi Sawah	5.00	19.73	335.15	401.98	3.95	1.20	7.35
2	Padi Ladang	3.00	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00	7.35
3	Jagung	7.80	18.93	227.22	262.30	2.43	1.15	7.35
4	Kacang Tanah	1.60	0.00	1.45	937.00	0.00	647.55	7.35
5	Ubi Kayu	13.00	10.67	254.42	223.96	0.82	0.88	7.35
6	Ubi Jalar	77.00	357.00	11.22	8.41	4.64	0.75	7.35
7	Kelapa Hibrida	2.10	1.72	1.14	171.00	0.82	149.74	7.35
8	Kelapa Dalam	16.89	13.78	9.82	1203.00	0.82	122.57	7.35
9	Kopi Robusta	25.64	46.25	8.77	352.00	1.80	40.16	7.35
10	Kopi Arabika	67.07	73.70	2.79	1731.00	1.10	621.32	7.35
11	Cokelat	256.75	106.42	11.37	1342.00	0.41	118.07	7.35
12	Cengkeh	11.68	11.50	1.46	138.47	0.98	95.10	7.35
13	Jambu Mente	107.65	3.15	6.74	0.00	0.03	0.00	7.35
14	Kemiri	29.14	1.30	2.68	164.00	0.04	61.15	7.35
15	Kapuk	6.24	1.30	2.51	70.00	0.21	27.94	7.35
16	Vanili	0.17	0.02	408.00	6.00	0.12	0.01	7.35

Sumber: Hasil Analisis 2019

2) Analisis Gabungan SSA dan LQ

Analisis gabungan SSA dan LQ digunakan untuk melihat bagaimana peranan suatu sektor dalam suatu wilayah dan atau daerah. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk menentukan komoditi yang memiliki keunggulan komperatif dan dapat menjadi komoditi unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan.

Perhitungan nilai *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share Analysis* (SSA) pada Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6 Interpretasi Nilai LQ dan SSA pada Komoditas Tanaman Perkebunan dan Persawahan di Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

No	Komoditas	Location Quotient	Shift Share	Tipologi Sektor
		LQ	PB	
1	Padi Sawah	<1	>0	3
2	Padi Ladang	>1	>0	3
3	Jagung	<1	>0	3
4	Kacang Tanah	>1	>0	3
5	Ubi Kayu	<1	>0	3
6	Ubi Jalar	>1	>0	3
7	Kelapa Hibrida	<1	>0	3
8	Kelapa Dalam	<1	>0	3
9	Kopi Robusta	>1	>0	3
10	Kopi Arabika	>1	>0	3
11	Cokelat	>1	>0	3
12	Cengkeh	>1	>0	3
13	Jambu Mente	>1	>0	3
14	Kemiri	>1	>0	3
15	Kapuk	>1	>0	3
16	Vanili	<1	>0	3

Sumber: Hasil Analisis 2019

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5 dan tabel 6 dapat dilihat bahwa pada nilai LQ >1 dan nilai *Shift Share* >0 menggambarkan bahwa komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan di daerah tersebut. Komoditi yang dapat dijadikan sebagai komoditi unggulan pada Kecamatan Bontolempangan adalah padi ladang, kacang tanah, ubi jalar, kopi robusta, kopi arabika, cokelat, cengkeh, jambu mente, kemiri dan kapuk.

Untuk nilai LQ <1 dan nilai *shift Share* >0, berarti komoditi tersebut dapat menjadi komoditi andalan pada wilayah tersebut. Di Kecamatan Bontolempangan komoditi yang menjadi komoditi andalan adalah padi sawah, jagung, ubi kayu, kelapa hibrida, kepala dalam dan vanili.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa semua komoditas yang ada di Kecamatan Bontolempangan berada pada tipologi sektor 3 yang berarti “Komoditas Berkembang” baik komoditi unggulan maupun komoditi andalan, sehingga strategi pengembangan kawasan agrowisata Kecamatan Bontolempangan yang perlu dikaukan adalah:

➤ Pengembangan SDM

Sumber daya manusia yang ada di Desa Bontolempangan terdiri dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani dengan kualitas dan kemampuan bertani yang mumpuni, Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kawasan merupakan suatu upaya memberdayakan masyarakat local yang tentunya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Keikutsertaan dalam pengambilan peran oleh masyarakat setempat disebabkan karena mereka lebih mengetahui seluk beluk kampung dan desanya termasuk sejarah yang ada didalamnya, disamping itu mereka telah memahami tatacara bertani tradisional yang dilakukan secara turun menurun serta mengetahui jenis-jenis tanaman yang tumbuh serta khasiat yang terkandung didalamnya. untuk pengembangan SDM masyarakat setempat perlu dilakukan pelatihan teknik budidaya pertanian yang dipadukan dengan teknik secara turun temurun yang telah mereka lakukan selama ini. Disamping itu perlu sosialisasi terhadap pengembangan daerah mereka menjadi Kawasan agrowisata.

➤ Pengembangan Teknologi Informasi dan Inovasi Pertanian

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data dan informasi yang lebih cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi internet ini jika dimanfaatkan dengan maksimal untuk pengembangan agrowisata di Desa Bontolempangan akan mempengaruhi pengembangan agrowisata serta akan lebih mudah melakukan pemasaran dan informasi mengenai lokasi agrowisata yang ada di Desa Bontolempangan. Selain itu teknologi inovasi pertanian perlu di kembangkan agar kegiatan agrowisata berjalan dengan cepat seperti adanya mesin-mesin atau alat-alat pertanian modern yang membantu kegiatan pertanian yang ada di lokasi agrowisata.

➤ Peningkatan Efisiensi dan kualitas serta Nilai Tambah Produk Pertanian

Keadaan perekonomian suatu wilayah akan sangat mempengaruhi kinerja dari wilayah itu sendiri. Peningkatan perekonomian suatu daerah mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta kesempatan kerja. Pengembangan dan pembangunan yang dilakukan diharapkan akan terjadi perbaikan distribusi pendapatan dalam masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pengembangan Kawasan agrowisata di daerah ini akan mendorong pertumbuhan perekonomian baik jangka pendek ataupun jangka Panjang. Pertumbuhan ekonomi ini yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata dalam Kawasan serta pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendukung lainnya.

➤ Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Dalam pengembangan suatu kawasan, penyediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi sebagai syarat dan dukungan terhadap pengembangan wilayah. Sarana prasarana merupakan penunjang jalannya sebuah usaha di suatu wilayah agar memudahkan akses dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pengunjung kawasan agrowisata.

➤ Pengembangan Kualitas Bidang Sosial Budaya

Lingkungan sosial budaya masyarakat setempat merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan Kawasan agrowisata. Jumlah penduduk dari suatu wilayah dan perilaku sosial budaya yang dimiliki merupakan bagian dari faktor sosial budaya yang akan mempengaruhi pengembangan Kawasan. Selain kemungkinan terjadi pergeseran faktor sosial budaya pada masyarakat setempat, juga perubahan sosial dan budaya pada wisatawan yang berkunjung. Seperti pergeseran pola konsumen wisatawan yang saat ini dari wisata konvensional berbentuk industri skala besar berubah ke produk wisata *back to nature* yang lebih bersifat natural, otentik, dan eksotik yang memberikan penghargaan terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini merupakan peluang dan tantangan dalam pengembangan Kawasan agrowisata dimana perilaku sosial ekonomi masyarakat setempat dengan budaya dan kultur mereka dapat menjadi daya Tarik dan mendukung pengembangan agrowisata.

c) Kesimpulan

Potensi sektor pertanian di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa yaitu pada komoditi ubi jalar, kelapa dalam, kopi robusta, kopi arabika, cokelat, jambu mente dan kemiri.

Komoditi yang dapat dijadikan sebagai komoditi unggulan pada daerah penelitian adalah padi ladang, kacang tanah, ubi jalar, kopi robusta, kopi arabika, cokelat, cengkeh, jambu mente, kemiri. dan kapuk. Sedangkan komoditi yang menjadi komoditi andalan adalah padi sawah, jagung, ubi kayu, kelapa hibrida, kelapa dalam, vanili.

Komoditas yang ada di Desa Bontolempangan berada pada tipologi sektor 3 yang berarti “Komoditas Berkembang” baik komoditi unggulan maupun komoditi andalan sehingga strategi pengembangan agrowisata yang perlu dilakukan yaitu : 1). pengembangan sumber daya manusia, 2) pengembangan teknologi informasi dan inovasi pertanian, 3) peningkatan efisiensi dan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, 4) peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dan 5). pengembangan kualitas bidang sosial budaya.

d) Saran

Di Desa Bontolempangan banyak komoditi yang menjadi sektor basis seperti kacang tanah, ubi jalar, kopi robusta, cengkeh, kelapa hibrida, kelapa dalam, kopi robusta, kemiri dan cokelat yang harus dikembangkan dan diintegrasikan dalam pengembangan agrowisata.

Dalam upaya pengembangan agrowisata berbasis komoditi unggulan diharapkan untuk dibuatkan *master plan* pengembangan secara komprehensif dan holistic dalam pengembangan wilayah Kabupaten Gowa

DAFTAR PUSTAKA

Anisah A, Soedwihjono S, Miladan N. Analisis Perkembangan Wilayah Kecamatan Kartasura Sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. *Jurnal Tata Loka* 20 (4), 484-499, 2017.

Annisa CI, Santoso EB. Arahana Pengembangan Kawasan Agropolitan Berdasarkan Komoditas Unggulan Prioritas Tanaman Pangan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Teknik ITS* 8 (2), 2019.

Anshar M, Pemanfaatan Daerah Rawan Bencana Longsor Menjadi Lahan Pertanian Berbasis Mitigasi di Sulawesi Selatan. *Puslitpen UIN Alauddin Makassar*, 2018.

Anshar M, Strategi Pengembangan Agrowisata di desa Bontolempangan Kabupaten Gowa. *Puslitpen UIN Alauddin Makassar*, 2019.

Anshar M Siradjuddin I, Mahsyurah A. Analisis Pengembangan Agropolitan Malolo Melalui Pemetaan Komoditas Basis dan Unggulan. *Puslitpen UIN Alauddin Makassar*., 2020.

Choirah A, Diartho HC, Komariyah S. Peranan Subsektor Tanaman Pangan Terhadap Perekonomian Jawa Timur: Pendekatan Input-Output. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK)* 4 (1), 2020.

Cipta SW, Sitorus SRP, Lubis DP. Pengembangan Komoditas Unggulan di Wilayah Pengembangan Tumpang Kabupaten Malang. *Jurnal Kawistara* 7(2), 115-206, 2017.

Djakapermana RD, Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Berbasis Rencana Tata Ruang Nasional. Direktorat Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia., 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Mushaf Al Qur'an dan terjemahannya, Al-Huda: Jakarta, 2002.

Haris WA, Sarma M, Falatehan AF. Analisis Peranan Subsektor Tanaman Pangan Terhadap Perekonomian Jawa Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. DOI: <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.3.231-242>., 2018.

Jauhari A. Pemanfaatan SIG untu Pemetaan Kawasan Produksi Komoditas Unggulan Pangan di Kabupaten Pacitan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. DOI: <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.3.154-171>., 2020.

Kessa W. Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I., 2015.

Khairad F, Noer M, Refdinal M. Analisis Wilayah Sentra Produksi Komoditas Unggulan pada SubSektor Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura di Kabupaten Agam. *Jurnal Agrifo* 5 (1), 2020,

Martadona I, Purnamadewi YL, Najib M. Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Tanaman Pangan di Kota Padang. *Jurnal Tata Loka* 16 (4), 234-244, 2014.

Martadona I, Leovita A. Peranan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Terhadap Pembangunan Ekonomi Wilayah Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tata Loka* 21 (2), 328-334, 2018.

Mulyono J. Pengembanga Komoditas Pertanian Unggulan di Wilayah Perbatasan Bengkulu Mendukung Pengembangan Lumbung Pangan. *Jurnal Tata Loka* 22(3), 331-341, 2019.

- Martauli ED, Gracia S. Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dataran Tinggi Sumatra Utara. *Jurnal Agrifor* 20(1), 2021.
- Nugraha AN, Widiatmaka dan Firmansyah I. Arahan Pengembangan Lahan Untuk Padi Sawah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. *Jurnal Tata Loka* 21 (3), 390-406, 2018.
- Priadi G, Sutandi A, Firdaus M. Pemerataan Sebagai Arahan Rencana dan Strategi Pembangunan. *Jurnal Tata Loka* 21 (3), 544-557, 2018.
- Rejeki PS, Mardiansjah FH. Analisis Prioritas Strategi Pengembangan Kawasan Pertanian Padi Berbasis Preferensi Petani di Kabupaten Kendal. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 14(3), 187-198, 2018.
- Resigia E, Syahrial. Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tata Loka* 22 (1), 41-49, 2019.
- Sadesmesli I, Baskoro DPT, Pravitasari AM. Daya Dukung Lahan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Blitar, Jawa Timur), *Jurnal Tata Loka* 19 (4), 266-279, 2017.
- Savitry R, Tafonao W. Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna* 13 (1), 2019.
- Setiyanto A, Irawan B. Pembangunan Berbasis Wilayah: Dasar Teori, Konsep Operasional dan Implementasinya di Sektor Pertanian, 2014.
- Suryani S, Sitorus SRP, Sudadi U. Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. *Jurnal Wilayah dan Kota* 8 (2), 147-160, 2020.
- Talaohu M, Matitaputty IT, Sangadji M, Analisis Peranan Sektor Pertanian dan Pengembangannya di Kabupaten Buru. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi* XIII (2), 2019.

Zamhari A, Sitorus SRP, Pravitasari AE. Analisis Komoditas Unggulan dan Arahana Rencana Pengembangannya di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Tata Loka* 19 (3), 218-229, 2017.

Zulkarnain, Hartanto N. Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Mahakam Hulu. *Jurnal Agrifor* 19 (2), 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri PU Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Departemen PU Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 56/Permentan
/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan
Pertanian.

BIOGRAFI PENULIS



MUHAMMAD ANSHAR, dilahirkan di Ujung Pandang (Makassar saat ini), tanggal 03 Juni Tahun 1976. Status penulis sudah menikah dengan Nelia Syafriawati Mallombasang dan dikarunia 4 (empat) orang putra dan putri masing-masing: Muhammad Farhani Awalishar Anshar, Fauzan Nur Fikri Anshar, Muthiah Rihun Nada dan Mumtazah Kayyisah Adibah.

Pendidikan di Universitas Hasanuddin Jurusan Sosial Ekonomi tahun lulus 2001, Tahun 2006 melanjutkan ke program S2 Prodi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan di tahun 2012 lanjut studi S3 pada Prodi Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis juga menyusun penelitian diantaranya: Pemanfaatan daerah rawan bencana longsor menjadi lahan pertanian Berbasis mitigasi di Sulawesi Selatan dilaksanakan di Tahun 2018, Strategi Pengembangan Agrowisata di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa tahun 2019 dan Pemetaan komoditi basis di Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar dan juga beberapa jurnal baik internasional maupun nasional.

Pelatihan profesional yang pernah diikuti penulis antara lain: Pelatihan (*Integrated Coastal Zone Planning and Manajement*), Diklat Peningkatan SDM Pengawasan dan Pemantauan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Tahun dengan penyelenggara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan PKPSL-IPB, Pelatihan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir . Kerjasama Jurusan Ilmu Kelautan-Unhas dan Bappeda Prov. Sulsel, Makassar, Pelatihan Proses Perencanaan Pembangunan Tahun 2005 dengan penyelenggara Kerjasama Bappenas - UNDP - Bappeda Prov. Sulsel, Training *Small Medium Enterprise*, Australia Indonesia Partnership Tahun 2007, Training Program on *Regional Economic Development Support* (REDS) Tahun 2009 dengan penyelenggara UGM dan Rotterdam, The Netherlands, Apresiasi Pengembangan IPTEK.